



Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota Bontang 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**



Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota Bontang 2018

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BONTANG 2018

ISSN: 2656-9272

Nomor Publikasi: 64740.1909

Katalog: 4102004.6474

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 66 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Pencetak:

CV. Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Srie Sis Sugianto, M.Si.

Penanggung Jawab Teknis:

Intan Kusuma Negara, S.E., M.M.

Editor:

Intan Kusuma Negara, S.E., M.M.

Gita Lestari, S.S.T.

Penulis dan Pengolahan Data:

Nuha Azizah Gunawan, S.S.T.

Desain/Layout:

Buyung Candra Pamungkas, A.Md.

Gita Lestari, S.S.T.

Hergias Widityasari, S.S.T.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami haturkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan jalan dan kemudahan bagi Kami dalam menyelesaikan publikasi “**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2018**” ini. Publikasi ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Bontang dari waktu ke waktu.

Data yang disajikan dalam publikasi ini sebagian besar diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) Kota Bontang tahun 2018, dan dilengkapi dengan data pendukung dari berbagai sumber terkait. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, data terbaru dalam publikasi ini bukan lagi data tahun berjalan, namun data lengkap satu tahun (*time lag data* satu tahun). Selain itu, terkait dengan peluncuran angka proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 oleh BPS dan Bappenas pada awal tahun 2014, telah dilakukan penyesuaian (*backcasting*) data hasil survei tahun 2011—2012, sehingga data tahun 2011 dan 2012 juga mengalami penyesuaian (revisi) apabila dibandingkan dengan data yang ditampilkan pada publikasi tahun-tahun sebelumnya.

Kami menyadari masih banyak indikator kesejahteraan rakyat yang belum disajikan di dalam publikasi ini. Namun kami berharap kehadiran publikasi ini dapat berperan positif dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Bontang. Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini.

Bontang, November 2019

Kepala BPS Kota Bontang



Ir. Srie Sis Sugianto, M.Si

<https://bontangkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sistematika Penulisan	2
1.3. Sumber Data	3
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI	5
2.1. Kependudukan	5
2.2. Pendidikan	7
2.3. Kesehatan.....	8
2.4. Ketenagakerjaan.....	9
2.5. Perumahan	10
2.6. Pengeluaran Rumah Tangga	10
BAB III. KEPENDUDUKAN	11
3.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk.....	12
3.2. Fertilitas dan Keluarga Berencana	17
BAB IV. KESEHATAN	23
4.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, dan Rata-rata Lama Sakit	25
4.2. Fasilitas Kesehatan	29
4.3. Kesehatan Balita	31
BAB V. PENDIDIKAN	35
5.1. Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan	36
5.2. Tingkat Partisipasi Sekolah	39
5.3. Fasilitas Kesehatan	41

BAB VI. KETENAGAKERJAAN.....	43
6.1. Keadaan Angkatan Kerja	44
6.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	47
6.3. Jam Kerja.....	49
BAB VII. PERUMAHAN	51
7.1. Kondisi Perumahan	51
7.2. Fasilitas Rumah	54
BAB VIII. POLA KONSUMSI.....	61
8.1. Pengeluaran Rumah Tangga.....	61
8.2. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga	63

<https://bontangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Indikator Demografi Kota Bontang, 2014-2018	14
Tabel 3.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan, 2017-2018.....	18
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Pertama Perkawinan, 2018.....	19
Tabel 4.1. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, 2017-2018.....	28
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, 2017-2018.....	29
Tabel 4.3. Rasio Sarana Kesehatan Terhadap 10.000 Pemduduk Kota Bontang, 2013-2018	30
Tabel 4.4. Persentase Penolong Pertama Persalinan Kota Bontang, 2015-2018.....	32
Tabel 5.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011-2018	37
Tabel 5.2. APK, APM, dan APS Kota Bontang, 2017-2018	40
Tabel 5.3. Rasio Murid Guru Kota Bontang, 2011-2018.....	41
Tabel 5.4. Jumlah Sekolah Kota Bontang, 2011-2018.....	42
Tabel 6.1. Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama, 2017-2018	45
Tabel 6.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu di Kota Bontang, 2018.....	49
Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, 2016-2018	52
Tabel 7.2. Kondisi Perumahan di Kota Bontang, 2016-2018	53
Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/ Bangunan di Kota Bontang, 2016-2018.....	55

Tabel 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, 2016-2018	56
Tabel 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, 2018.....	57
Tabel 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2016-2018	58
Tabel 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, 2016-2018.....	58
Tabel 8.1. Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Makanan Rumah Tangga Kota Bontang, 2017-2018.....	65
Tabel 8.2. Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Non Makanan Rumah Tangga Kota Bontang, 2017-2018.....	66

<https://bontangkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Persebaran Penduduk Kota Bontang, 2018.....	12
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk, 2014-2018	13
Gambar 3.3. Piramida Penduduk Kota Bontang, 2018.....	16
Gambar 3.4. Persentase Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Pemakaian KB, 2018.....	21
Gambar 3.5. Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Jenis KB, 2018.....	22
Gambar 4.1. Analisi Derajat Kesehatan Hendrik L.Blum	23
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang, 2011-2018	25
Gambar 4.3. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2018.....	26
Gambar 4.4. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kota Bontang, 2018.	27
Gambar 4.5. Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2018.....	33
Gambar 5.1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bontang, 2011-2018.....	38
Gambar 6.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2018	48
Gambar 6.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2018.....	48
Gambar 6.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2018	50
Gambar 8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bontang, 2018	62
Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Sebulan di Kota Bontang, 2018	63
Gambar 8.3. Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Jenisnya Kota Bontang, 2018.....	64

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Bahwasanya mengamankan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini negara berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dengan menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Begitupun yang definisi kesejahteraan sosial tercantum dalam UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Jokowi memiliki agenda prioritas pembangunan yang disebut Nawacita. Terdapat 9 poin nawacita yang diagendakan, salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Pemerintahan Kota Bontang memiliki visi yaitu “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2015-2021 yang mencakup meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan, hingga meningkatkan pembangunan perkotaan dan pemukiman.

Untuk mendukung berjalannya proses pembangunan tersebut, ketersediaan berbagai informasi sangat dibutuhkan. Peranan penting informasi di dalam pembangunan bukan hanya sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan, namun juga sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa informasi kualitatif maupun kuantitatif yang disajikan dalam bentuk bermacam-macam indikator.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2018 hadir sebagai bagian dari penyediaan informasi, terutama mengenai keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bontang. Data yang disajikan di dalam publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas dalam menjalankan perannya masing-masing di dalam proses pembangunan Kota Bontang khususnya, dan Indonesia umumnya.

Data dalam publikasi ini dihasilkan dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan metodologi yang dirancang sedemikian rupa sehingga kehadiran kendala-kendala di dalam metodologi dapat diterima secara umum. Perkembangan sosial antar waktu di dalam publikasi ini merupakan kondisi makro. Oleh sebab itu data tersebut perlu disandingkan dengan berbagai data lain yang sifatnya mikro sehingga diperoleh gambaran kondisi kesejahteraan rakyat Kota Bontang yang holistik (menyeluruh).

1.2. Sistematika Penulisan

Delapan bagian besar Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2018 ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang, sistematika penulisan dan sumber data;
- Bab II. Konsep dan Definisi, membahas tentang konsep-konsep dan definisi-definisi dari pembahasan ;
- Bab III. Kependudukan, memuat data dan ulasan tentang penduduk dan karakteristiknya, keluarga berencana dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kependudukan ;

- Bab IV. Pendidikan, memuat data dan ulasan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase melek huruf, dan sebagainya ;
- Bab V. Kesehatan, memuat data dan ulasan tentang gambaran derajat kesehatan masyarakat beserta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ;
- Bab VI. Ketenagakerjaan, memuat data dan ulasan tentang kondisi angkatan kerja, lapangan usaha dan jenis pekerjaan ;
- Bab VII. Perumahan, memuat data dan ulasan tentang kondisi perumahan dan keadaan lingkungan perumahan dan terakhir;
- Bab VIII. Pola Konsumsi, yang memuat data dan ulasan mengenai pengeluaran dan konsumsi rumah tangga;

Setiap pembahasan dilengkapi dengan pengertian konsep dan definisi sebagai landasan teori yang digunakan pada bab tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca mengkaji dan menelaah isi pembahasan pada setiap bab.

1.3. Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2018 disusun berdasarkan data primer hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Sebagian besar data merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 yang dilakukan setiap semester, Survei Angkatan Kerja (SAKERNAS) Tahun 2018 yang juga dilakukan setiap semester, dan dilengkapi dengan data penduduk yang diperoleh dari proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010. Selain itu, beberapa data sekunder yang bersumber dari dinas/instansi terkait juga digunakan sebagai pelengkap dan pembanding. Pendataan SUSENAS dilakukan dua kali dalam setahun, adapun angka Kabupaten/Kota didapat dari SUSENAS Semester I sedangkan angka level Provinsi didapatkan pada SUSENAS Semester II. Sehingga data yang digunakan adalah SUSENAS Semester I yang peruntukan estimasinya adalah level Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data terbaru yang disajikan di dalam publikasi ini adalah data dengan *time lag* satu tahun (tahun 2018), maka data yang digunakan adalah data yang sudah lengkap satu tahun. Selain itu, data tahun 2011—2012 juga mengalami revisi (penyesuaian) berkaitan dengan telah diluncurkannya angka

Pendahuluan

proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS dan Bappenas pada bulan Januari 2014 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010. Sedangkan data tahun 2019 akan disajikan pada publikasi berikutnya, yaitu setelah diperoleh data lengkap satu tahun.

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi merupakan suatu hal mendasar yang dapat menyebabkan perbedaan penilaian terhadap suatu fenomena. Dalam melakukan kegiatan sensus dan survei, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan suatu konsep dan definisi yang digunakan secara seragam di seluruh Indonesia dan mengacu pada konsep-konsep yang digunakan secara luas di dunia internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar kesetaraan perbandingan (*apple to apple comparison*) antar wilayah di dalam negeri maupun antar negara dapat dilakukan. Beberapa konsep dan definisi yang digunakan di dalam publikasi ini adalah sebagai berikut.

2.1. Kependudukan

Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang telah berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia (region wilayah provinsi/kab/kota) selama enam bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sebaliknya, setiap orang yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (region wilayah provinsi/kab/kota) selama enam bulan atau lebih, dan mereka yang telah pergi kurang dari enam bulan namun bertujuan untuk pindah, dianggap sebagai bukan penduduk.

Jumlah penduduk merupakan perpaduan antara kekuatan yang menambah dan yang mengurangi banyaknya penduduk. Kekuatan yang menambah banyaknya penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk (penduduk datang), sedangkan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk adalah kematian dan migrasi keluar (penduduk pindah).

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik melewati batas politis negara, batas administrasi, maupun batas bagian dalam suatu negara/region/wilayah provinsi/kab/kota dengan tujuan menetap. Sesuai dengan definisi penduduk di atas, maka seseorang dianggap migran jika telah tinggal selama enam bulan berturut-turut atau kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan akan menetap.

Perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat diukur dengan indikator laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan faktor kematian disebut dengan laju pertumbuhan alamiah, sedangkan laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi oleh migrasi disebut dengan laju pertumbuhan sosial.

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu (1) penduduk usia belum produktif yaitu penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun, (2) penduduk usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15—64 tahun, dan (3) penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih.

Berdasarkan tipikal wilayah tempat tinggalnya, penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan. Bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di wilayah perdesaan disebut dengan urbanisasi atau lebih sering diartikan sebagai arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Kelahiran adalah anak lahir hidup, yaitu anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan (seperti jantung berdenyut, bernapas, menangis, dan sebagainya), walaupun mungkin hanya beberapa saat saja. Sedangkan anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan dan pada saat pencacahan/pendataan masih hidup, baik yang tinggal bersama ibunya maupun tinggal di tempat lain. Kematian adalah suatu peristiwa atau keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan dari seseorang.

Khusus untuk penduduk berjenis kelamin wanita, terdapat dua kelompok besar berdasarkan usia, yaitu wanita usia subur dan wanita bukan usia subur. Wanita usia subur adalah wanita yang berada pada masa mampu melahirkan atau masa reproduksi (usia 15-49 tahun), sedangkan di luar rentang usia itu dianggap sebagai wanita bukan usia subur.

Hal yang berkaitan erat dengan wanita usia subur adalah penggunaan alat/cara Keluarga Berencana (KB). Pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi/cara KB disebut dengan akseptor. Seseorang dianggap sebagai peserta KB aktif apabila pada saat pencacahan/pendataan masih aktif mengikuti

program KB (memakai alat kontrasepsi/cara KB). Yang dimaksud dengan metode kontrasepsi adalah suatu cara/alat yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

2.2. Pendidikan

Hal pertama yang terkait dengan pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila memiliki kemampuan membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu jenis huruf (misalnya Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Sanskerta, dan sebagainya). Dalam hal ini, orang buta yang dapat membaca dan menulis Huruf Braille, dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan sebagai dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Berdasarkan hal tersebut, maka penduduk yang dapat membaca dan menulis baik Huruf Latin, Arab, maupun huruf lainnya digolongkan sebagai penduduk melek huruf. Kemampuan menulis dan membaca ini biasanya dihitung untuk penduduk usia 10 tahun ke atas.

Hal berikutnya yang terkait dengan pendidikan adalah jenjang pendidikan atau sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah formal yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional, mulai dari pendidikan Dasar (SD dan SMP), pendidikan Menengah (SMK atau SMA), pendidikan Tinggi (Akademi dan Universitas), dan pendidikan yang setara (paket A, paket B, dan paket C), tidak termasuk pendidikan non formal seperti kursus mengetik, komputer, bahasa Inggris, Seskoad, Diklatpim dan sebagainya.

Berdasarkan keikutsertaan seseorang pada suatu jenjang pendidikan, terdapat empat definisi penting yaitu (1) tamat sekolah, (2) tidak/belum pernah bersekolah, (3) masih bersekolah, dan (4) tidak bersekolah lagi. Seseorang dikatakan tamat sekolah apabila telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Seseorang tidak/belum pernah bersekolah, termasuk yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar, maka dikategorikan sebagai tidak/belum pernah bersekolah. Namun, apabila seseorang sedang mengikuti pendidikan di salah satu jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi), maka dikategorikan sebagai masih bersekolah. Sedangkan seseorang pernah mengikuti jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, dan pada saat pencacahan sudah tidak aktif lagi, maka dikategorikan sebagai tidak bersekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang baik sudah tamat maupun tidak/belum tamat. Penduduk putus sekolah adalah mereka yang tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan.

Masing-masing jenjang pendidikan disetarakan dengan kelompok usia penduduk. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) disesuaikan dengan penduduk berusia 7-12 tahun, SMP dengan penduduk berusia 13-15 tahun, SMA dengan penduduk berusia 16-18 tahun, dan perguruan tinggi dengan penduduk berusia 19-24 tahun. Oleh sebab itu, usia 7-24 tahun dianggap sebagai usia sekolah. Sedangkan pendidikan prasekolah diselenggarakan selama satu sampai dua tahun bagi anak usia 5-6 tahun, yang merupakan persiapan sebelum memasuki Sekolah Dasar.

2.3. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal, atau hal lain.

Sakit adalah apabila seseorang menderita penyakit kronis atau mempunyai keluhan/gangguan kesehatan lain yang menyebabkan kegiatan sehari-hari terganggu. Sedangkan cara pengobatan adalah perlakuan/cara yang ditempuh oleh seseorang apabila menderita suatu penyakit, seperti pergi ke dokter praktek, rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya, atau berusaha mengobati sendiri.

2.4. Ketenagakerjaan

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk berusia kurang dari 15 tahun. Penduduk usia kerja pun dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi karena bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti). Pengukuran bekerja atau tidak ini dilakukan berdasarkan periode rujukan (*time reference*) yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu yang dihitung mundur mulai sehari sebelum hari pencacahan.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan dan keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus, dan hasil usaha berupa sewa, bunga, dan keuntungan yang berupa uang maupun barang. Termasuk bekerja adalah seseorang yang punya pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena sakit, cuti, mogok, menunggu panen dan lain-lain.

Seseorang dikatakan menganggur apabila tidak bekerja, tidak juga sementara tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru. Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan, termasuk kegiatan menunggu jawaban lamaran. Sedangkan mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan. Termasuk juga orang yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Hari kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam hari yang dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan bekerja paling sedikit selama satu jam terus menerus. Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja. Jam kerja normal adalah 35-44 jam perminggu.

2.5. Perumahan

Bangunan tempat tinggal yang dikuasai oleh rumah tangga merupakan suatu bangunan fisik yang memiliki lantai, dinding, dan atap. Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik yang terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah, atau lainnya. Luas lantai yang menjadi objek di dalam survei adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap).

Atap rumah adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah tangga yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Sedangkan dinding rumah adalah sisi luar/batas suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain.

Beberapa indikator lain yang terkait dengan kondisi perumahan rumah tangga adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal, sumber penerangan utama yang digunakan, sumber air minum utama, dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar.

2.6. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan yang mencakup semua barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian oleh pihak lain, maupun dari produksi sendiri. Konsumsi rumah tangga hanya terbatas pada barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak termasuk pengeluaran untuk usaha atau diberikan kepada pihak lain.

BAB III. KEPENDUDUKAN

Salah satu subyek pembangunan adalah masalah kependudukan. Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kependudukan dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Selain sebagai subjek, penduduk berperan sebagai penggerak pembangunan dan juga objek pembangunan. Idealnya, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dinikmati hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi kependudukan termasuk di dalamnya kapasitas penduduk suatu wilayah.

Aspek yang perlu diperhatikan terkait kependudukan salah satunya adalah struktur penduduk yaitu distribusi penduduk menurut kelompok umur. Struktur penduduk menjadi penting karena perilaku dan kebutuhan ekonomi manusia akan berubah sesuai dinamika kondisi penduduk. Selain itu, mengetahui struktur penduduk di suatu wilayah dapat membantu mengidentifikasi apakah suatu ekonomi memiliki keuntungan demografi.

Berbicara masalah penduduk, diharapkan pembangunan tidak terpaku pada kuantitas namun juga kualitas penduduk suatu wilayah. Dikarenakan penduduk juga merupakan subjek pembangunan, kualitas penduduk juga perlu diperhatikan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang rendah akan menjadi beban dan akan menghambat jalannya proses pembangunan. Sebaliknya jika jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang baik, dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pembangunan berwawasan kependudukan merupakan salah satu cara agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan local, perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat local, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pentingnya posisi kependudukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program kependudukan. Data

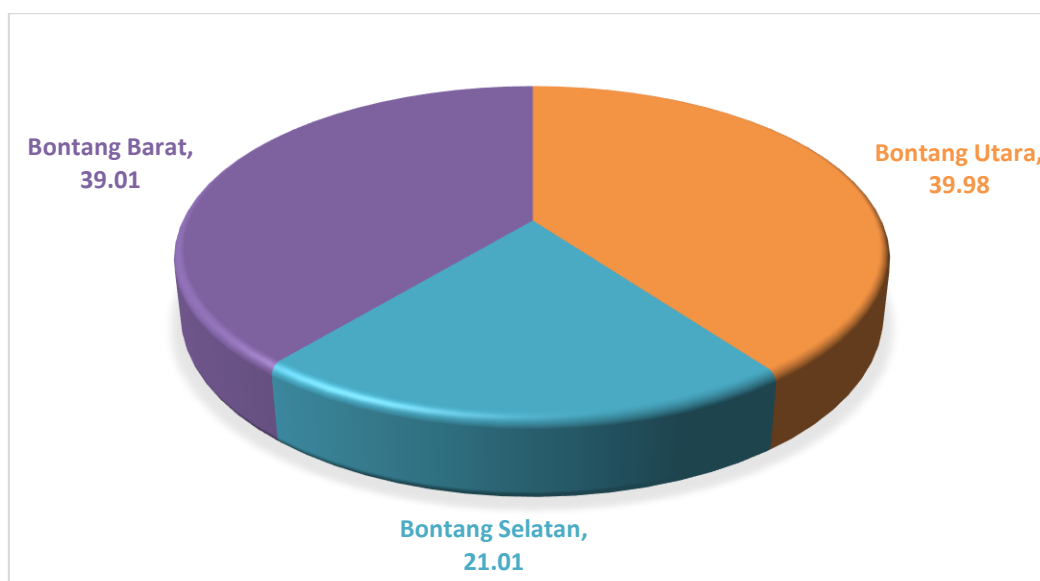
kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah, sedang, maupun yang akan diterapkan.

Pada tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami Bonus Demografi (*The Windows of Opportunity*). Bonus Demografi diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan banyaknya penduduk usia produktif disertai dengan menurunnya Rasio Ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin et. al. 2003). Bonus Demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang sehingga menurunkan proporsi penduduk muda (Ross, 2004). Pada periode ini, belanja public yang semula diperuntukkan bagi program-program social dapat dialihkan untuk melakukan investasi pada sector-sektor produktif dan infrastruktur.

3.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Kota Bontang yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan, memiliki luas wilayah sebesar 158, 2276 km² dengan jumlah penduduk sebesar 174.206 jiwa. Penduduk Kota Bontang tersebar diketiga kecamatan dengan sebesar 39,98 persen berada di Kecamatan Bontang Utara, sebesar 39,01 persen di Kecamatan Bontang Barat, dan sisanya sebesar 21,01 persen berada di Kecamatan Bontang Selatan.

Gambar 3.1. Persentase Persebaran Penduduk Kota Bontang, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Berdasarkan kepadatannya, Kecamatan Bontang Utara memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kedua kecamatan sisanya yaitu sebesar 2180 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Bontang Barat dan Bontang Selatan sebesar 2048 jiwa/km² dan 627 jiwa/km². Kota Bontang juga merupakan Kota dengan banyak pulau kecil yaitu sebanyak 22 pulau, dengan 3 pulau yang berpenghuni seperti Pulau Melahing, Tihi-Tihi, dan Gusung.

Penduduk Kota Bontang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan Proyeksi Penduduk BPS 2010-2035, tercatat penduduk Kota Bontang Tahun 2014 adalah sebesar 155.880 jiwa. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2018 sebesar 174206 jiwa dengan laju pertumbuhan per tahunnya adalah berkisar 2 persen. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kota Bontang dari tahun 2014 – 2018 berfluktuasi disekitar 2,1 hingga 2,4. Laju pertumbuhan sempat melambat pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,17 persen, namun selanjutnya diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan pada dua tahun setelahnya. Tercatat pada tahun 2018 laju pertumbuhan Kota Bontang sebesar 2,36 persen dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk, 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Adanya perubahan Luas Wilayah Kota Bontang pada Tahun 2017 dengan memasukkan pulau-pulau kecil, berdampak pada kepadatan tahun 2017 yang lebih kecil dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 1954 jiwa/km².

Namun seiring dengan bertambahnya penduduk, kepadatan penduduk Kota Bontang Tahun 2018 mencapai 1101 jiwa/km².

Tabel 3.1. Indikator Demografi Kota Bontang, 2014-2018

Indikator Demografi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (orang)	155 880	163 326	166 868	170 611	174 206
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,39	2,32	2,17	2,24	2,36
Rasio Jenis Kelamin (persen)	110	110	110	110	109
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	1 080	1 105	1 049	1 054	1 101
Komposisi Penduduk (persen)					
0-14 tahun	30,94	30,79	29,75	29,41	29,07
15-64 tahun	67,74	67,97	68,79	69,04	69,27
65+ tahun	1,32	1,24	1,46	1,55	1,65
Angka Beban Ketergantungan	47,62	47,13	45,37	44,84	44,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Berbicara Struktur Penduduk, dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dan umur. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Bontang masih di dominasi oleh Penduduk Laki-laki. Hal ini terlihat pada angka Rasio Jenis Kelamin (RJK) Kota Bontang Tahun 2018 sebesar 109,42. Dimana terdapat 109 Laki-laki per 100 Perempuan. RJK Kota Bontang Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang konsisten pada angka 110. Adapun struktur penduduk berdasarkan umur dapat dibagi menjadi kelompok umur produktif dan tidak produktif. Umur produktif adalah umur pada Angkatan Kerja yaitu umur 15-64 tahun. Penduduk di umur ini diharapkan dan yang berpeluang besar untuk bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi Kota

Bontang. Sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 ke atas. Penduduk pada Kelompok Umur ini adalah penduduk umur bersekolah dan lansia yang kemungkinan kecil untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Penduduk Kota Bontang dari Tahun 2014 hingga 2018 masih di dominasi oleh penduduk produktif yang dari tahun ke tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Tercatat sebesar 67,74 persen penduduk usia 15-64 tahun di tahun 2014. Angka ini meningkat hingga pada tahun 2018 sebanyak 69,27 persen penduduk usia 15-64 tahun. Sejalan dengan meningkatnya persentase penduduk usia produktif, maka semakin menurun persentase penduduk tidak produkti. Hal ini ditandai dengan Angka Beban Kebergantungan (*Depedency Ratio*) yang semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Tercatat Angka Beban Kebergantungan Kota Bontang Tahun 2014 adalah sebesar 47,62 persen dan menurun hingga pada tahun 2018 Angka Beban Kebergantungan sebesar 44,35 persen. Artinya pada tahun 2018, sebanyak 100 penduduk produkti menanggung 44-45 penduduk yang tidak produktif.

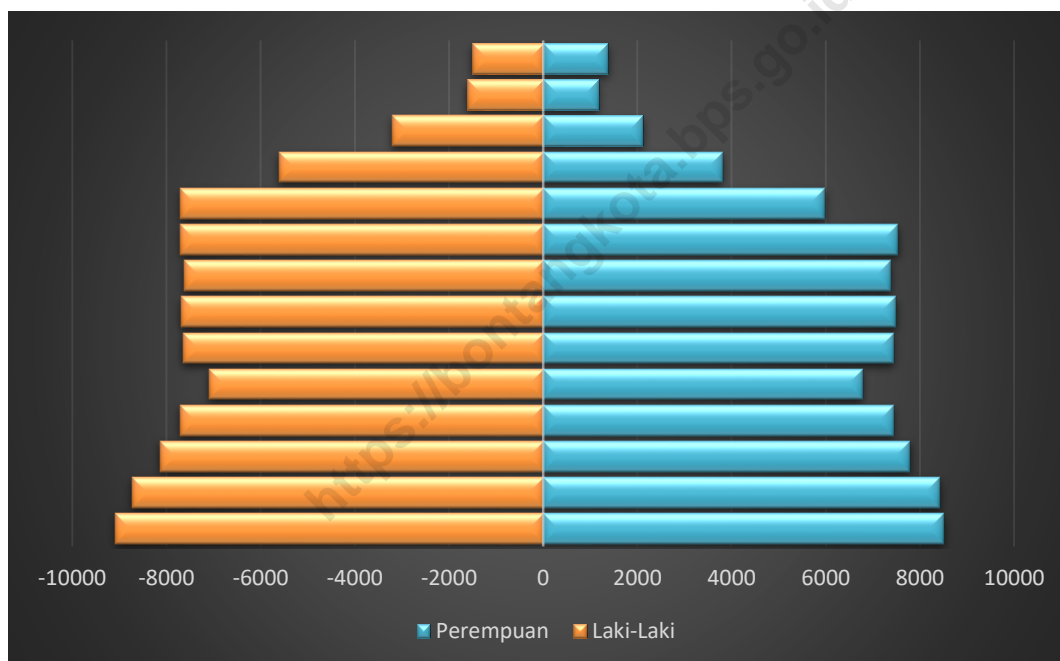
Sedangkan pada kelompok umur 0-14 tahun dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 29,07 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fertilitas mengalami penurunan dalam kurun 5 tahun terakhir. Hal ini tidak berlaku pada penduduk kelompok umur 65 keatas, diman cenderung meningkat dari tahun 2015. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,65 persen penduduk lansia dimana lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,55 persen. Hal ini dapat dipengaruhi oleh umur harapan hidup penduduk Kota Bontang yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan untuk penduduk lansia.

Komposisi penduduk secara lebih detil dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk disajikan dalam bentuk grafik batang dengan satu sisi menunjukkan penduduk laki-laki dan di sisi lainnya menunjukkan penduduk perempuan. Pada umumnya terdapat tiga buah bentuk pramida penduduk. Pertama adalah *Expansive* dimana bentuk piramida yang sebagian besar komposisi penduduknya berada pada usia muda. Kedua *Stationer*

Kependudukan

yaitu bentuk piramida yang bentuknya hampir rata komposisi penduduknya di setiap kategori dewasa. Terakhir adalah *Constructive* dimana piramida yang sebagian besar penduduknya berada pada usia tua yang membentuk pola batu nisan. Bentuk piramida pada Negara berkembang sebagian besar berbentuk pola *Expansive*. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran di Negara berkembang masih tinggi dan asilitas kesehatan yang mulai cukup baik. Sementara piramida di Negara maju sebagian besar berbentuk *Constructive* dimana kelahiran cukup rendah dan fasilitas penunjang kesehatan sudah sangat baik sehingga angka mortalitas juga rendah.

Gambar 3.3. Piramida Penduduk Kota Bontang, 2018



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang

Bentuk piramida penduduk Kota Bontang berbentuk *Expansive*, sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Meningkatnya penduduk produktif dibandingkan dengan penduduk non produktif, identik dengan kondisi bonus demografi. Hal ini haruslah dimanfaatkan oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan Kota Bontang. Proporsi penduduk produktif yang lebih besar, diharapkan dapat menambah nilai ekonomi terhadap kegiatan ekonomi Kota Bontang. Jika tidak dimanfaatkan, kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Justru kemungkinan yang

terparah jika tidak memanfaatkan momentum ini akan menjadi Bencana Demografi.

3.2. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Komposisi penduduk selain dipengaruhi oleh migrasi, juga dapat dipengaruhi oleh Fertilitas (Kelahiran) dan Mortalitas (Kematian) yang terjadi secara alamiah. Angka fertilitas yang tinggi dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan adanya ledakan penduduk bagitu pula jika angka fertiltas yang terlalu rendah. Pola fertilitas pada negara berkembang biasanya lebih besar dibandingkan dengan negara maju yang cenderung memiliki angka fertilitas yang kecil. Begitu pula Indonesia yang saat ini tengah mengontrol angka fertilitas dengan kebijakan KB yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 1970-an. Hasil dari kebijakan ini dapat dikatakan berhasil menekan angka fertilitas yang tinggi menjadi rendah.

Mortalitas dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup penduduk yang lahir di tahun tersebut. Semakin besar angka mortalitas akan memengaruhi angka harapan hidup yang rendah terhadap penduduk yang lahir di tahun tersebut. Pola angka mortalitas pada negara berkembang cenderung lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka harapan hidup yang lebih kecil dibandingkan dengan negara maju. Banyak faktor yang memengaruhi angka mortalitas beberapa diantaranya adalah fasilitas kesehatan, pola hidup sehat masyarakat, angka kesakitan, dan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Fertilitas sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, usia perkawinan pertama, dan kebiasaan atau budaya maupun faktor agama yang memengaruhi seseorang cenderung memiliki anak banyak. Perhitungan indikator fertilitas dilakukan pada penduduk usia 10 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang sudah mulai berpeluang untuk bereproduksi. Kemampuan reproduksi sendiri ditandai dengan perkawinan yang bukan hanya saja perkawinan sah namun juga perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap suami-istri oleh masyarakat sekitarnya. Tabel berikut menunjukkan proporsi penduduk berdasarkan status perkawinan.

Kota Bontang Tahun 2018 memiliki proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang sudah atau pernah menikah lebih besar dibandingkan dengan yang belum menikah. Persentase penduduk yang berstatus kawin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 60,14 persen. Penduduk yang berstatus kawin didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 62,49 persen, sedangkan dari penduduk laki-laki yang berstatus kawin 58,02 persen. Begitu pula untuk penduduk yang berstatus pernah kawin (cerai hidup dan cerai mati) didominasi oleh penduduk perempuan. Secara total persentase penduduk yang berstatus cerai hidup dan cerai mati secara berturut-turut adalah sebesar 2,02 persen dan 2,64 persen.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan, 2017-2018

Status Perkawinan	2017			2018		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	40,78	30,54	36,01	38,98	30,54	34,97
Kawin	56,10	62,79	59,22	58,02	62,49	60,14
Cerai Hidup	1,8	2,08	1,93	1,76	2,31	2,02
Cerai Mati	1,32	4,59	2,84	1,24	4,66	2,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Berbicara fertilitas erat hubungannya dengan wanita usia subur dan umur perkawinan pertama. Semakin muda wanita menikah, maka umur reproduksinya pun akan semakin panjang. Artinya semakin muda usia wanita menikah maka akan berpeluang memiliki anak yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita usia subur yang menikah di umur yang lebih tua. Hal ini tentu akan mempengaruhi struktur dan komposisi penduduk. Indonesia sendiri sudah mencanangkan umur minimal untuk pria dan wanita untuk menikah. Maraknya pernikahan dibawah umur dan resiko yang ditanggung dari perilaku tersebut secara kesehatan dan ekonomi, maka terdapat perubahan tentang UU No 1/1974 pasal 7. Peraturan

semula menyebutkan perkawinan hanya di izinkan pada pria yang mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, sedangkan adanya revisi maka minimal umur pihak wanita dan pria menjadi 19 tahun yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun Umur Kawin Pertama (UKP) wanita usia subur Kota Bontang adalah 22 tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 21 tahun. Begitu pula umur median wanita usia subur penduduk Kota Bontang tahun 2018 adalah 21- 22 tahun. Wanita usia subur dengan umur perkawinan pertama yang kurang dari 22 tahun atau menurut UU adalah 19 tahun perlu digarisbawahi.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Pertama Perkawinan, 2018

Kelompok Umur Perkawinan Pertama	Persentase
(1)	(2)
<=16	10,56
17-18	12,93
19-20	19,09
21+	57,41

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

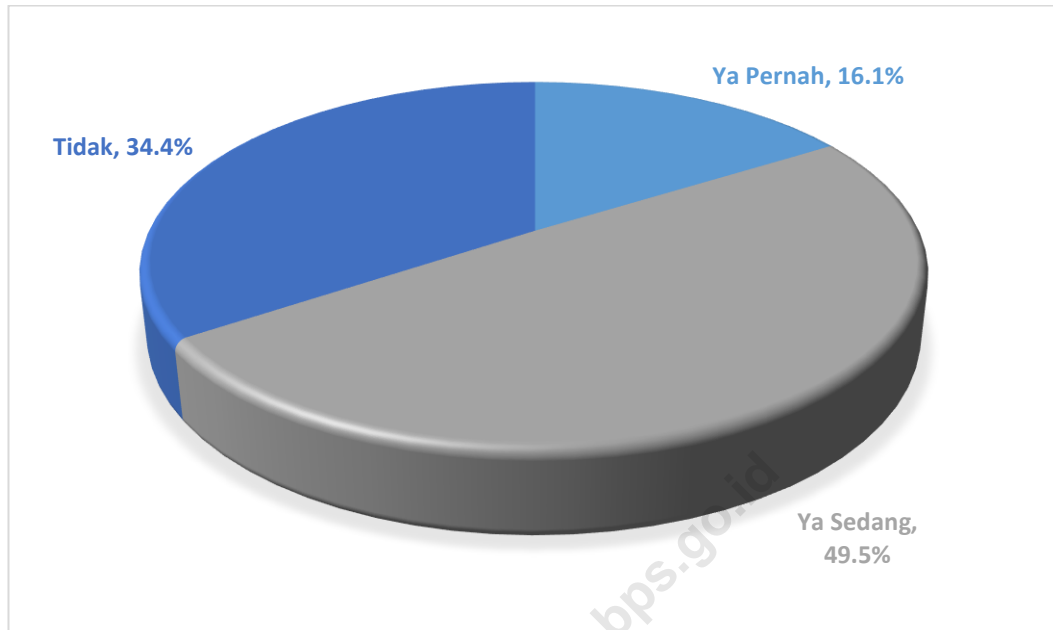
Di Kota Bontang sendiri terdapat sebesar 42,59 persen wanita usia subur memiliki usia perkawinan pertama dibawah 21 tahun. Sebesar 10,56 persen pada kelompok umur dibawah 16 tahun, 12,93 persen pada kelompok umur 17-18 tahun, dan sebesar 19,09 persen pada kelompok umur 19-20 tahun. Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang pernah dicapai, wanita usia subur dengan umur perkawinan pertama kurang dari 16 tahun dan kelompok umu 17-18 tahun sebagian besar mereka adalah wanita yang hanya mengenyam pendidikan SD. Sedangkan wanita usia subur yang menikah pada umur 19 tahun ke atas ialah wanita yang setidaknya menamatkan bangku SMA. Semakin dini usia pernikahan, maka

identik dengan minimnya pendidikan yang di emban. Di Kota Bontang sendiri praktik menikah dini nampaknya masih dipraktikkan yang sebagian besar dilandasi dengan kebiasaan pada suku tertentu untuk menikah dini. Pernikahan dini bukanlah hal yang kecil untuk dibiarkan. Terdapat dampak secara kesehatan, mental dan psikis pada wanita yang menjalaninya dan juga dampak sosial ekonomi.

Selain memperhatikan umur perkawinan pertama pada kelompok penduduk khususnya wanita usia subur, program Pemerintah yang telah berjalan hingga saat ini dalam mengontrol asilitas adalah Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi / KB yang memiliki berbagai jenisnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Target utama untuk kepesertaan KB adalah dnegan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant. Meningkatnya cakupan KB, diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat dikontrol dengan baik.

Kota Bontang sendiri pada tahun 2018, wanita usia subur yang pernah kawin sebesar 49,5 persen saat ini sedang menggunakan KB. Sedangkan yang tidak menggunakan sebesar 34,4 persen dan yang pernah menggunakan sebesar 16,1 persen (Susenas 2018). Berbagai alasan dan faktor pendorong yang membuat masih adanya wanita usia subur pernah kawin yang tidak menggunakan KB. Salah satunya adalah takut akan eek samping dari penggunaan KB sendiri.

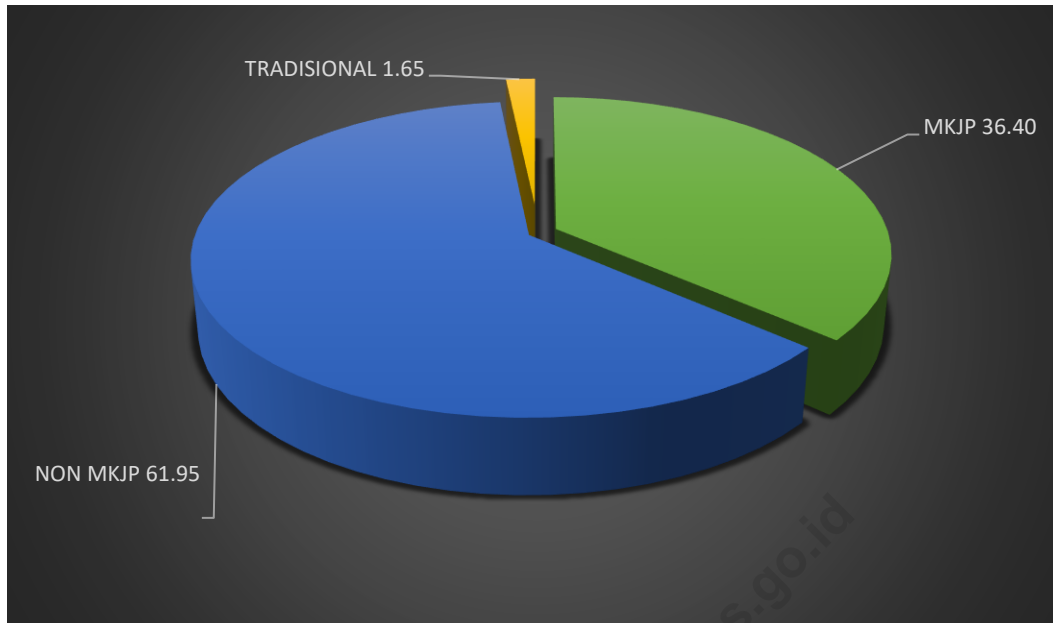
Gambar 3.4. Persentase Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Pemakaian KB, 2018



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Untuk wanita usia subur pernah kawin yang sedang menggunakan KB, sebesar 36,40 persen yang menggunakan KB MKJP. Sedangkan sebesar 61,95 persen memilih untuk berkontrasepsi jenis Non MKJP. Pilihan alat/cara KB oleh akseptor diantaranya dipengaruhi oleh harga, ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses alat/cara tersebut. Jika terjadi kenaikan harga alat kontrasepsi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, maka peluang pemakaian alat kontrasepsi juga akan mengalami penurunan. Begitu pula dengan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Semakin mudah akses dalam mendapatkan fasilitas kontrasepsi, maka cenderung alat kontrasepsi tersebut digunakan. Diantara pengguna KB, nampaknya KB dengan suntikan dan IUD menjadi pilihan sebagian besar penduduk Kota Bontang dengan persentase berturut-turut sebesar 27,47 persen dan 26,03 persen. Selanjutnya diikuti dengan penggunaan Pil KB sebesar 23,96 persen dan pemakaian Kondom sebesar 10,51 persen. Adapun hanya sedikit yang memilih KB secara Vasektomi dan pantang berkala yaitu hanya sebesar 0,75 persen dan 1,65 persen, sisanya terdapat pemakaian Susuk KB dan Tubektomi.

Gambar 3.5. Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Jenis KB, 2018

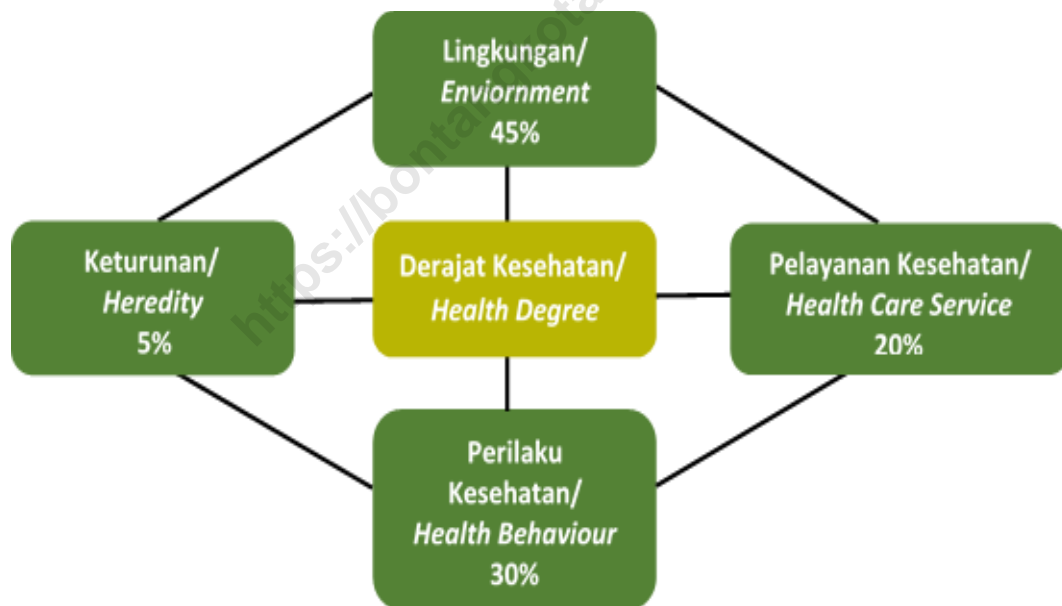


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

BAB IV. KESEHATAN

Kondisi umum kesehatan di Indonesia digambarkan dalam derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dapat dicerminkan melalui beberapa indikator terpilih, seperti angka harapan hidup, angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi. Kesehatan masyarakat bukan hanya berasal dari sector kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti ekonomi dan pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keturunan. Menurut Teori Derajat Kesehatan yang dikembangkan oleh Hendrik L.Blum menjawab hubungan ini dalam sebuah diagram.

Gambar 4.1. Analisa Derajat Kesehatan Hendrik L.Blum



Di dalam teorinya L.Blum mengembangkan teori derajat kesehatan yang dipengaruhi empat determinan yang saling terkait yaitu lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan merupakan determinan yang paling dominan memengaruhi derajat kesehatan sebesar 45 persen. Perilaku kesehatan memiliki pengaruh 30 persen, pelayanan kesehatan 20 persen, dan keturunan 5 persen. Lingkungan memberikan pengaruh yang tinggi

karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Lingkungan umumnya dibagi menjadi aspek fisik dan sosial. Lingkungan yang menyangkut aspek fisik seperti sampah, air, udara, tanah, iklim, dan perumahan. Sementara lingkungan yang menyangkut aspek sosial adalah kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi. Contoh indikator lingkungan dalam aspek fisik yang mudah diukur adalah ketersediaan sanitasi layak dan air bersih. Perilaku merupakan faktor kedua yang memengaruhi derajat kesehatan, mencakup perilaku individu, keluarga, maupun masyarakat. Perilaku hidup yang sehat tentunya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perilaku dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat ekonomi yang melekat pada individu.

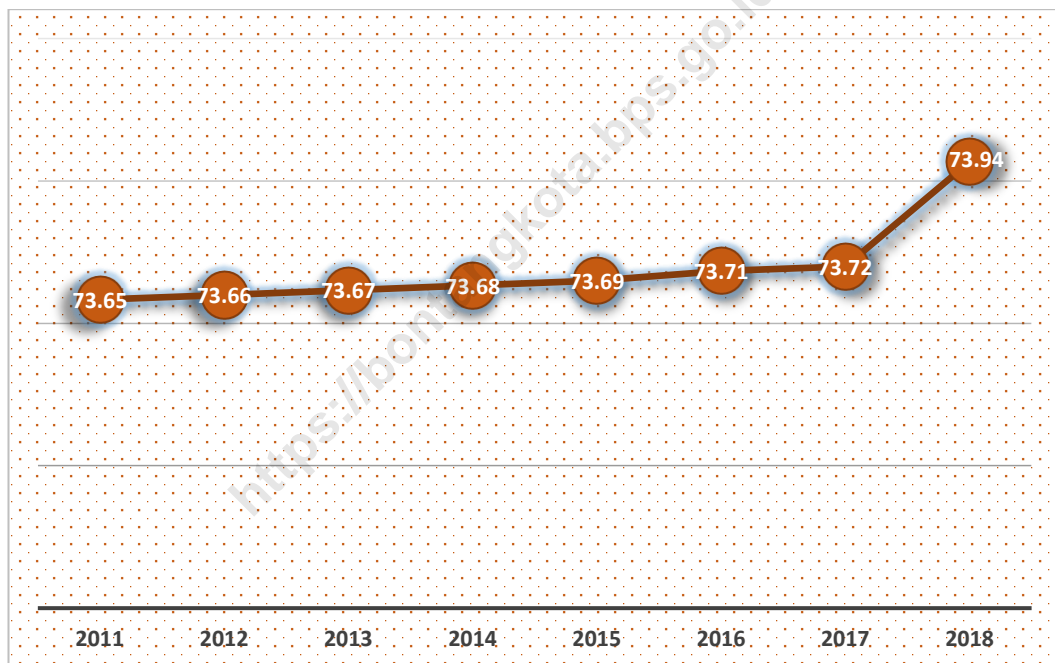
Pelayanan kesehatan adalah faktor ketiga yang memengaruhi situasi derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat menentukan pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan terhadap penyakit, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus diimbangi dengan kemudahan akses dan ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan dan informasi kesehatan. Faktor terakhir adalah keturunan dimana faktor yang melekat dalam individu yang dibawa sejak lahir seperti penyakit genetik (Dinas Kesehatan Cilacap, 2014).

Adapun RPJMD Kota Bontang 2016-2021 sendiri mencantumkan tujuan di aspek kesehatan yaitu “Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Kesehatan”. Tujuan ini tertuang pada beberapa tujuan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menurunnya penyebaran penyakit menular maupun tidak menular. Berikut indikator kesehatan yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat Kota Bontang Tahun 2018.

4.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, dan Rata-rata Lama Sakit

Dalam Rencana Strategis (Resntra) Kementerian Kesehatan 2015-2019, disebutkan bahwa sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dicerminkan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, Kematian Ibu, dan Prevalensi kurang gizi pada balita. Adapun Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang sebagai berikut.

Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang, 2011-2018

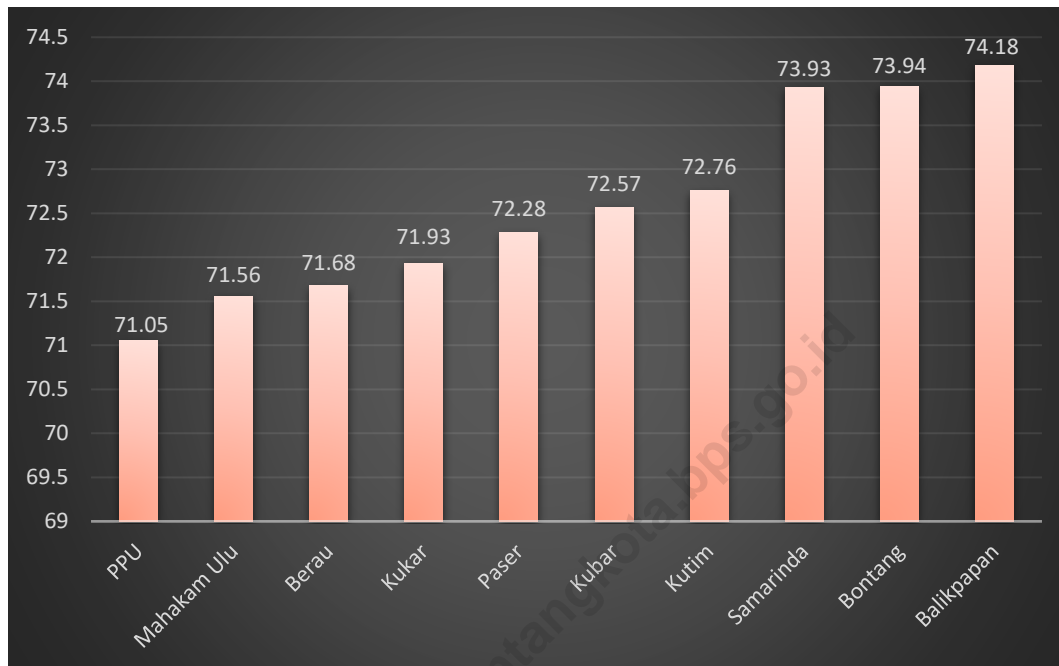


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Tercatat Angka Harapan Hidup Kota Bontang meningkat dari tahun ke tahunnya dari 73,65 tahun pada tahun 2011 menjadi 73,94 tahun pada tahun 2018. Artinya pada tahun 2018 penduduk yang lahir di tahun ini diharapkan akan hidup hingga 73,94 tahun. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2018, dimana naik sebesar 2,2 jika dibandingkan dengan kenaikan tahun-tahun sebelumnya hanya sebesar 0,01 hingga 0,02 tahun. Namun dengan peningkatan ini, Pemerintah Kota Bontang masih perlu memertahankan dan lebih membenahi fasilitas-fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kota Bontang. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bontang

jika dibandingkan dengan AHH Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur menduduki peringkat kedua setelah Kota Balikpapan yang sebesar 74,18 tahun.

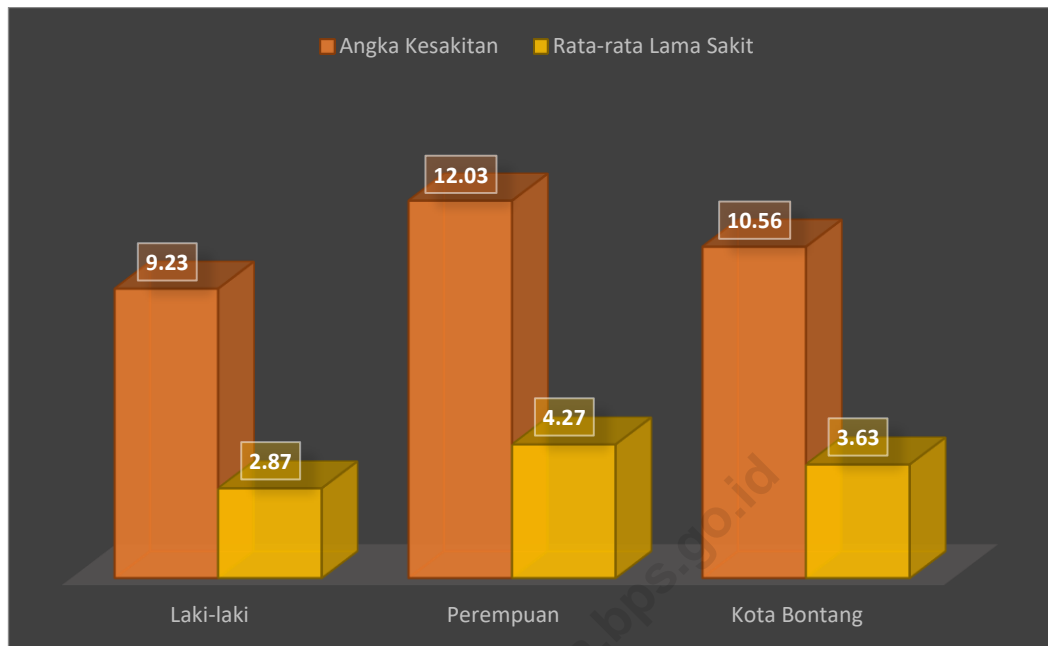
Gambar 4.3. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2018



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Kondisi kesehatan masyarakat Kota Bontang dapat digambarkan dengan Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit. Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam susenas, Angka Kesakitan (Mordibitas) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan maka semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut. Rendahnya derajat kesehatan dapat dilihat dengan tingginya Angka Kesakitan. Adapun Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kota Bontang sebagai berikut.

Gambar 4.4. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kota Bontang, 2018



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Angka Kesakitan Kota Bontang tercatat sebesar 10,56 dimana terdapat 10 – 11 penduduk dari 100 penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Adapun Rata-rata Lama Sakit penduduk Kota Bontang berkisar 3-4 hari. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan memiliki Angka Kesakitan yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk Laki-laki yaitu sebesar 12,03. Artinya sebanyak 12 -13 penduduk perempuan yang mengalami gangguan kesehatan dari 100 penduduk perempuan, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 9,23 yaitu sebanyak 9 penduduk. Begitupun dengan Rata-rata Lama Sakit, penduduk perempuan memiliki Rata-rata Lama sakit lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 4-5 hari, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 2-3 hari. (Susenas 2018, di olah)

Apabila diklasifikasikan berdasarkan kuintil pengeluaran, penduduk kuintil pengeluaran 20 persen teratas memiliki Angka Kesakitan yang lebih rendah yaitu sebesar 9 penduduk per 100 penduduk. Jika dibandingkan dengan kuintil lainnya, penduduk dengan kuintil pengeluaran 40 persen tengah memiliki Angka Kesakitan paling besar yaitu sebanyak 11 penduduk, diikuti dengan penduduk

kuintil 40 persen terbawah yaitu sebanyak 10 penduduk per 100 penduduk. (Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018)

Diantara penduduk yang mengalami gangguan kesehatan terdapat 52,99 persen penduduk yang melakukan berobat jalan sisanya tidak melakukan berobat jalan. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki cenderung lebih melakukan berobat jalan dibandingkan penduduk perempuan, yaitu sebesar 54,94 persen. Sedangkan penduduk perempuan yang melakukan berobat jalan sebesar 51,52 persen.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, 2017-2018

Berobat Jalan	2017			2018		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ya	54,51	57,61	56,02	54,94	51,52	52,99
Tidak	45,49	42,39	43,98	45,06	48,48	47,01
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Angka ini berkebalikan dengan kondisi tahun 2017 dimana penduduk perempuan lebih memilih berobat jalan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk perempuan yang berobat jalan sebesar 57,61 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 54,51 persen. Penduduk yang tidak melakukan berobat jalan sebagian besar alasannya adalah sudah mengobati sendiri. Berikut tabel alasan penduduk yang tidak berobat jalan.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, 2017-2018

Alasan Tidak Berobat Jalan	2017			2018		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Biaya Berobat	-	0,47	0,22	0,00	0,49	0,29
Tidak Ada Biaya Transport	-	-	-	0,56	0,19	0,34
Tidak Ada Sarana Transportasi	-	-	-	0,54	0,19	0,33
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	-	-	-	-	-	-
Mengobati sendiri	62,50	62,29	62,40	63,90	78,12	72,26
Tidak Ada Yang Mendampingi	-	-	-	-	0,84	0,50
Merasa Tidak Perlu	36,09	36,39	36,23	31,17	17,40	23,07
Lainnya	1,41	0,85	1,15	3,84	2,77	3,21
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

4.2. Fasilitas Kesehatan

Angka Harapan Hidup yang tinggi dan Mordibitas yang rendah sangatlah ditopang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah Kota Bontang. Fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh semua penduduk dan pelayanan yang prima merupakan kondisi ideal demi menunjang kondisi kesehatan masyarakat yang perlu Pemerintah Kota Bontang usahakan. Fasilitas kesehatan dapat dilihat dari jumlah Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Apotek, Praktik Dokter Keluarga, dan Posyandu. Berikut perkembangan aksesibilitas fasilitas kesehatan Kota Bontang.

Tabel 4.3. Rasio Sarana Kesehatan Terhadap 10.000 Penduduk Kota Bontang, 2013-2018

Jenis Fasilitas Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Balai pengobatan /klinik	0,24	0,31	0,55	0,72	0,64	0,80
Puskesmas	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34
Puskesmas pembantu	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11
Rumah sakit	0,31	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29
Klinik Bersalin	-	-	-	-	0,18	0,11
Apotek	1,10	1,44	1,35	1,20	1,11	1,15
Praktek dokter keluarga	-	-	-	1,86	2,23	3,21
Posyandu	6,84	7,08	6,98	7,13	6,97	6,77

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Rasio fasilitas kesehatan terhadap 10.000 penduduk adalah indikator yang dapat menggambarkan kemudahan akses penduduk terhadap suatu fasilitas kesehatan. Di Kota Bontang tahun 2018, nampaknya terdapat peningkatan jumlah Praktek Dokter Keluarga dimana di tahun sebelumnya yaitu menjadi 3,21. Artinya terdapat 3 buah fasilitas praktik dokter keluarga yang dapat di akses oleh 10.000 penduduk, yang dimana pada tahun sebelumnya hanya 2 tempat praktik. Untuk fasilitas Posyandu dan Apotek nampaknya tidak ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,77 dan 1,15. Dimana per 10.000 penduduk Kota Bontang dapat mengakses 6 – 7 Posyandu dan sebanyak 1 Apotek.

Adapun jumlah Rumah Sakit di Kota Bontang sebanyak 5 buah, dengan ditunjang sebanyak 6 Puskesmas dan 2 Puskesmas Pembantu. Adapun jumlah klinik di Kota Bontang sebanyak 14 buah dan Klinik bersalin sebanyak 2 buah. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan diharapkan dapat mempermudah masyarakat Kota Bontang untuk mengaksesnya. Semakin mudah di akses maka di harapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari segi kuratif.

Adapaun pelayanan kesehatan yang prima juga penting dalam menunjang peningkatan kesehatan masyarakat Kota Bontang. Salah satu pelayanan kesehatan saat ini adalah adanya Kartu BPJS PBI maupun NON PBI. BPJS PBI adalah kartu kesehatan yang diberikan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menagakses kesehatan.

Jaminan Kesehatan merupakan bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Adapun penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan di Kota Bontang Tahun 2018 adalah sebesar 87,34 persen. Nampaknya sebagian besar penduduk Kota Botang sudah menggunakan fasilitas pada berobat jalan. Hal ini juga tergambarakan apabila dilihat dari kelompok penduduk berdasarkan pengeluaran. Pada penduduk dengan kuintil pengeluaran 40 persen tengah sebesar 90,45 persennya menggunakan jaminan kesehatan dalam berobat jalan. Sebaliknya pada penduduk 20 persen teratas hanya sebesar 79,57 persen.

4.3. Kesehatan Balita

Perbaikan kualitas sumber daya manusia merupakan proses yang panjang dan kompleks, sehingga tidak dapat dilakukan dengan sekejap dan terfokus di satu aspek. Dengan begitu, hendaknya perbaikan sumber daya manusia dimulai sejak dari dalam kandungan. Mulai dari kecukupan gizi dalam kandungan, ilmu pengetahuan ibu beserta pasangannya akan kehamilan juga kelahiran, sampai pada tersedianya tenaga medis dan fasilitas dalam membantu proses kelahiran. Proses kelahiran bayi merupakan proses yang penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Adanya kesalahan dalam proses kelahiran akan mengakibatkan terganggunya kesehatan bayi hingga kematian bayi beserta ibunya. Seorang ibu yang melahirkan dapat ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong medis (Dokter dan Bidan) maupun non-medis (Dukun beranak/famili). Tabel berikut menunjukkan presentase penolong proses kelahiran menurut jenis pertolongan di tiga tahun terakhir.

Tabel 4.4. Persentase Penolong Pertama Persalinan Kota Bontang, 2015-2018

Penolong Kelahiran	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter	39,80	47,73	36,71	44,17
Bidan/tenaga medis lain	59,50	49,71	63,15	55,83
Dukun	0,60	2,56	-	-
Famili/lainnya	-	-	0,15	-
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

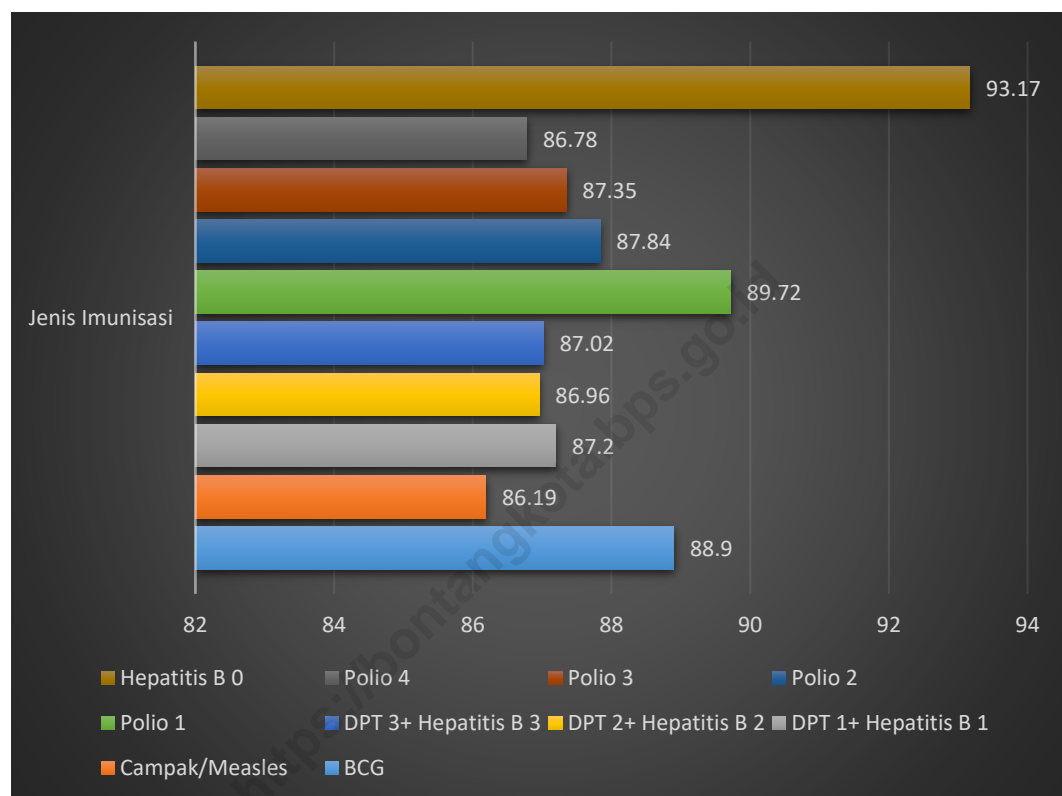
Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Tahun 2018 nampaknya sudah mengalami kemajuan dalam pilihan penolong pertama kelahiran. Sebesar 100 persen penduduk wanita yang melahirkan memilih melahirkan di fasilitas kesehatan yaitu Dokter dan Bidan, dengan persentase 44,17 persen memilih dokter dan sebesar 55,82 memilih bidan/tenaga medis lain. Dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, masih ada penduduk wanita yang memilih melahirkan pada dukun atau famili/lainnya. Hal ini dapat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih melahirkan pada tenaga medis/kesehatan, sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Adapun tempat melahirkan yang dipilih oleh perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan adalah fasilitas kesehatan sebesar 100 persen.

Selain faktor penolong pertama persalinan dan juga tempat melahirkan, adanya imunisasi untuk balita merupakan program pemerintah untuk peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit dan perkembangannya. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang sekitarnya. Jenis imunisasi

dasara yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Cmapak/Morbili dan Hepatitis B. Berikut persentase Balita yang sudah di imunisasi berdasarkan jenis imunisasi Tahun 2018.

Gambar 4.5. Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang

Berdasarkan pada grafik di atas, terlihat bahwa tahun 2018 persentase balita Kota Bontang yang mendapatkan imunisasi BCG sebesar 88,9 persen. Untuk pemberian vaksin polio rata-rata sudah mencapai angka 87 persen dengan Polio 1 sebesar 89,72 persen, Polio 2 sebesar 87,84 persen, Polio 3 sebesar 87,35 persen, dan Polio 4 sebesar 86,78 persen. Adapun imunisasi DPT dan Hepatitis 0, 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 93,17 persen, 87,2 persen, 86,96 persen, dan 87,02 persen. Adapun persentase balita yang sudah di imunisasi campak sebesar 86,19 persen.

BAB V. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembentukan modal manusi (human capital). Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang. Akumulasi modal manusia selama mengikuti masa pendidikan akan berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena terapat korelasi positif yang cukup kuat antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Sehingga dengan melakukan investasi pendidikan pada SDM yang dimiliki, pada jangka panjang akan membantu perbaikan distribusi pendapatan ketika SDM tersebut menjadi bagian yang signifikan dalam angkatan kerja.

Pendidikan merupakan salah satu tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2015-2021. Salah satu tujuannya adalah dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yaitu meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang professional, berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat, terjaminnya anak-anak jalanan/terlantar, anak-anak penyandang cacat dalam mengakses pendidikan maupun kesehatan, berkembangnya aktivitas kepemudaan dan olahraga dan yang terakhir adalah meningkatnya sarana prasarana penunjang pendidikan.

Peningkatan kualitas masyarakat di bidang pendidikan merupakan elemen penting untuk menunjang pembangunan sebuah daerah. Dengan pendidikan yang tinggi di antara masyarakatnya, maka banyak tersedia stok tenaga kerja yang memadai. Selain itu mereka dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan output/ pendapatan daerah. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan di suatu wilayah, dapat menjadi beban pemerintah. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung sulit untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Untuk itu, pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan pendidikan di suatu daerah perlu dilakukan.

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan, yang terdiri dari tiga jenis yaitu indikator input, proses, dan output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana proses pendidikan yang di implementasikan terjadi pada masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

Kota Bontang sendiri sebesar 69,27 persen merupakan penduduk di kelompok umur produktif. Hal ini harus di manfaatkan untuk meningkatkan pendidikan di kelompok umur penduduk yang masih bersekolah maupun yang sudah tidak bersekolah melalui beberapa penyediaan fasilitas pendidikan. Sehingga indikator pendidikan sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan dan sebagai perencanaan kebijakan selanjutnya.

5.1. Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan

Angka Melek Huruf Kota Bontang Tahun 2018 sebesar 99,77 persen. Apabila berdasarkan jenis kelamin, angka melek huruf perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu signifikan yaitu berturut-turut sebesar 99,79 persen dan 99,74 persen. Angka melek huruf Kota Bontang sudah termasuk tinggi. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pemerataan pendidikan di Kota Bontang. Adapun berdasarkan kemampuan membaca dan menulis, sebesar 98,45 persen penduduk Kota Bontang mampu membaca tulis huruf latin. Hanya sekitar 14,26 persen penduduk Kota Bontang yang dapat membaca dan menulis huruf lainnya selain huruf latin. Selain Angka Melek Huruf dan kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan penduduk Kota Bontang sebagian besar adalah lulusan SMA/SMK se derajat.

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011-2018

Tahun	SD Kebawah	Tamat SMP	Tamat SMA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	32,95	17,88	38,66	10,51
2012	33,57	19,30	37,75	9,38
2013	30,93	19,76	36,61	12,70
2014	32,72	18,11	38,40	10,77
2015	34,58	16,77	37,06	11,59
2016	42,87	11,04	33,66	12,42
2017	31,32	18,71	37,43	12,53
2018	35,24	13,64	37,71	13,40

Sumber: Susenas 2018

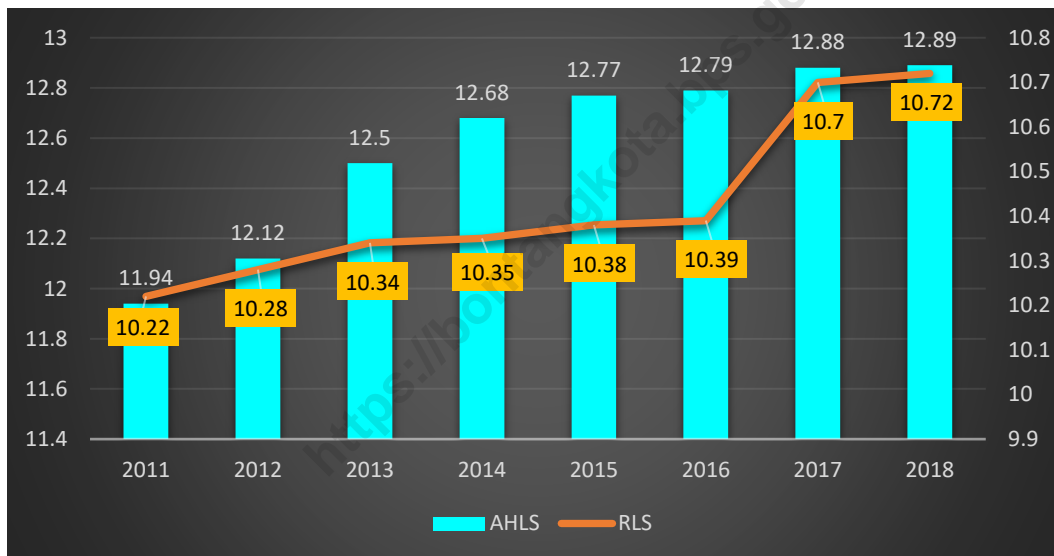
Persentase penduduk yang tingkat pendidikan SD kebawah masih menunjukkan angka yang besar yaitu sebesar 35,24 persen. Sedangkan penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan SMP dan SMA sebesar 13,64 persen dan 37,71 persen. Adapun penduduk yang telah mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 13,4 persen. Apabila diklasifikasikan menurut status pendidikan di Kota Bontang sebesar 6,19 persen penduduk Kota Bontang Tidak/belum pernah bersekolah. Sedangkan sebesar 26,15 persen Penduduk Kota Bontang masih mengenyam bangku pendidikan, sisanya sebesar 67,65 sudah tidak bersekolah lagi.

Salah satu indikator selain melek huruf adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS dapat didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Disamping Harapan Lama Sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan jumlah rata-rata tahun yang ditempuh dalam bersekolah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang sendiri juga menetapkan program wajar selama 12 tahun sejak 2004. Berikut Grafik AHLS dan RLS Kota Bontang dalam kurun waktu 8 tahun terakhir.

Gambar 5.1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bontang, 2011-2018



Dari grafik di atas dapat disandingkan antara Angka Harapan Lama Sekolah dengan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Sekolah Kota Botang sejak Tahun 2011 hingga 2018 mengalami kenaikan. Dari 11,94 tahun pada tahun 2011 hingga menjadi 12,89, yang artinya pada tahun 2018 penduduk usia sekolah diharapkan akan mengenyam pendidikan selama 12-13 tahun. Dalam tingkatan pendidikan diharapkan penduduk Kota Bontang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA dan Kuliah pada tahun pertama. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang masih dibawah Angka Harapan Lama Sekolah. Dari tahun 2011 Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang adalah 10,22 tahun atau pada jenjang SMA. Angka ini meningkat tiap tahunnya namun tidak signifikan, hingga tahun 2017 terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu

sebesar 10 tahun dan tahun 2018 sebesar 10 - 11 tahun. Apabila di konversikan pada jenjang pendidikan, penduduk Kota Bontang mengenyam minimal pada tingkat SMA kelas 2. Idealnya rata-rata lama sekolah dapat sebanding dengan angka harapan lama sekolah, sehingga tidak terlampau jauh antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi riil pendidikan masyarakat. Capaian tingkat pendidikan masyarakat Kota Bontang nampaknya perlu di “genjot” agar tercapai kondisi ideal tersebut.

5.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah indikator untuk melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Pada Tahun 2018 nilai APS pada kelompok umur SMP dan SMA lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Dimana pada tahun 2018 masih terdapat 0,64 persen penduduk umur SMP belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan di tahun 2017 hanya sebesar 0,09 persen saja yang tidak bersekolah. Begitu juga pada kelompok umur sekolah SMA dimana sebesar 16,53 persen penduduk kelompok umur SMA tidak bersekolah yang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan APS terjadi pada kelompok umur jenjang SD dimana sebesar 0,45 persen penduduk usia SD tidak bersekolah. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,74 persen.

Tabel 5.2. APK, APM, dan APS Kota Bontang, 2017-2018

Jenjang Pendidikan	APM		APK		APS	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	99,26	99,55	110,78	112,88	99,26	99,55
SMP/MTs	71,56	72,29	82,18	79,97	99,91	99,36
SMA/SMK/MA	71,20	63,39	102,38	75,37	91,31	83,47

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berkebalikan dengan APS, APM Kota Bontang pada jenjang SD dan SMP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada jenjang pendidikan SD, APM Kota Bontang sebesar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 99,55 persen yang sebelumnya sebesar 99,26 persen. Artinya terdapat sebesar 99,55 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tepat menduduki jenjang SD. Untuk jenjang SMP meningkat dari 71,56 persen menjadi 72,29 persen. Dimana terdapat 72,29 persen penduduk usia 13-15 tepat menduduki jenjang pendidikan SMP. Sebaliknya dengan APM jenjang SMA menurun dari 71,20 persen menjadi 63,39 persen. Dimana sebesar 63,39 persen penduduk usia 16-18 tahun tepat menduduki jenjang pendidikan SMA. Nilai APM Kota Bontang yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan namun tidak sesuai pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, APK pada tingkat SD merupakan perbandingan jumlah murid di tingkat SD dengan jumlah penduduk yang berusia antara 7—12 tahun. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen. Nilai APK dapat mengukur seberapa besar daya serap penduduk usia

sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan pendidikan dimana memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Di tahun 2018 terdapat peningkatan APK pada jenjang SD yaitu sebesar 112,88 persen. Artinya terdapat penduduk usia selain 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan SD. Sedangkan terdapat penurunan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA yaitu berturut-turut sebesar 79,97 persen dan 73,37 persen.

5.3. Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah Rasio Murid dan Guru per jenjang pendidikan dan jumlah sekolah yang tersedia. Pada tahun 2018, rasio murid guru pada jenjang SD adalah 16,36 artinya setiap guru mengampu 16 – 17 murid. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,75 dimana satu guru masih mengampu 19-20 murid. Begitupula pada jenjang SMP yaitu sebesar 14,80, dimana satu guru mengampu sebanyak 14-15 murid. Angka ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,19. Semakin banyak rasio maka semakin tidak efektif pada kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya semakin sedikit rasio antara murid dan guru maka diharapkan semakin efektif dalam kegiatan belajar mengajar.

Tabel 5.3. Rasio Murid Guru Kota Bontang, 2011-2018

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SD	18,83	21,27	18,68	17,69	20,17	18,78	19,75	16,38
SMP	12,71	14,54	15,28	13,86	16,76	15,62	15,19	14,80
SMA	10,54	12,17	12,10	9,91	13,29	12,54	12,01	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

Adapun jumlah sekolah di Kota Bontang dari tahun ke tahun mengalami penambahan khususnya pada jenjang SMA. Tahun 2018 banyaknya sekolah SD masih sama dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan pada jenjang SMP mengalami pengurangan dari 35 menjadi 34 sekolah. Adapun pada tingkat SMA mengalami peningkatan dari 26 sekolah menjadi 27. Semakin banyak sekolah yang dibangun di Kota Bontang, maka akan meningkatkan akses ke fasilitas pendidikan.

Tabel 5.4. Jumlah Sekolah Kota Bontang, 2011-2018

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	56	34	21
2012	59	34	22
2013	60	33	25
2014	60	33	25
2015	60	33	25
2016	61	35	26
2017	61	35	26
2018	61	34	27

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

BAB VI. KETENAGAKERJAAN

Dalam proses pembangunan, penduduk yang berada pada sua posisi yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai sasaran pembangunan itu sendiri. Sebagai pelaku dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan. Semakin banyak Sumber Daya Manusia haruslah dibarengi dengan SDM yang berkualitas, sehingga dapat diberdayakan dan memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak, namun tidak di imbangi dengan kualitas SDM yang baik maka akan berdampak negative terhadap pembangunan.

Berbicara penduduk, penduduk di usia produktiflah yang menjadi sorotan utama untuk menunjang sektor pembangunan. Kelompok ini (15-64 tahun) dapat menjadi aset bagi bangsa sebagai agen pembangunan, namun juga dapat menjadi beban disaat yang bersamaan. Bila penduduk usia produktif memiliki kualitas yang tinggi baik dari segi pendidikan maupun keterampilan, maka dapat menjadi pendorong kuat majunya pembangunan di suatu wilayah. Sebaliknya, jika memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah akan menjadi beban pada proses pembangunan.

Penduduk usia produktif erat kaitannya dengan Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam Rangka Kerja Pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja tiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk yang relative lebih tinggi haruslah di imbangi dengan kesempatan/lapangan pekerjaan yang tersedia. Laju pertumbuhan yang tinggi namun tidak di imbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu pengangguran. Masalah yang sering di hadapi oleh Negara berkembang adalah terbatasnya kesempatan kerja di sektor

formal, sehingga sebagian besar penduduk berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal.

Pekerja di sektor informal memiliki ciri seperti pekerja dengan pendidikan yang rendah, jam kerja yang tidak tetap, produktivitas rendah dan pendapatan rendah. Melihat kondisi ketenagakerjaan demikian, maka perlu adanya upaya program yang memfasilitasi masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru. Tenaga kerjayang lebih mandiri dan memiliki kualitas yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja dan secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup penduduk.

6.1. Keadaan Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPAK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu.

Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Berikut tabel yang menggambarkan ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2017 dan 2018.

Tabel 6.1. Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama, 2017-2018

Kegiatan Utama	2017			2018		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	53 145	24 737	77 882	53 378	27 429	80 807
Bekerja	46 009	22 181	68 190	47 142	25 897	73 039
Pengangguran Terbuka	7 136	2 556	9 692	6 236	1 532	7 768
Bukan Angkatan Kerja	10 538	32 295	42 833	11 949	31 258	43 207
Sekolah	5 929	3 956	9 885	5 740	5 948	11 688
Mengurus Rumah Tangga	1 930	27 387	29 317	2 776	24 426	27 202
Lainnya	2 679	952	3 631	3 433	884	4 317
Jumlah	63 683	57 032	120 715	65 327	58 687	124 014
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,45	43,37	64,52	81,71	46,74	65,16
Tingkat Pengangguran	13,43	10,33	12,44	11,68	5,59	9,61
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	86,57	89,67	87,56	88,32	94,41	90,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penduduk Kota Bontang Tahun 2018 sebesar 65,16 persen tergolong Angkatan Kerja dimana sisanya sebesar 34,84 persen adalah Bukan Angkatan Kerja. Apabila dilihat lebih dalam persentase Angkatan Kerja penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sebesar 81,71 persen penduduk laki-laki merupakan angkatan kerja sedangkan penduduk perempuan hanya sebesar 46,74 persen. Hal ini wajar karena peran laki-laki sebagian besar adalah kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah. Sebaliknya penduduk perempuan identic dengan mengurus rumah tangga. Namun ada hal yang menarik jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase angkatan kerja perempuan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk Perempuan untuk terjun dalam bursa angkatan kerja.

Tidak semua angkatan kerja terjun ke lapangan kerja untuk bekerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Kota Bontang tahun 2018, sebesar 58,90 persen penduduknya bekerja. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 56,49 persen. Begitupun bila dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan yang bekerja lebih besar di tahun 2018 yaitu sebesar 44,13 persen yang sebelumnya hanya 38,89 persen. Hal ini menarik untuk diteliti lebih mendalam apakah peningkatan penduduk wanita yang bekerja adalah semakin luasnya lapangan kerja untuk wanita di Kota Bontang ataupun sebaliknya adanya keadaan yang terpaksa dimana perempuan harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Adapun tingkat pengangguran Kota Bontang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 9,61 persen yang di tahun sebelumnya sebesar 12,44 persen. Pengangguran terbuka di Kota Bontang justru didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu sebesar 6.236 orang sedangkan perempuan sebesar 1.532 orang. Dalam kondisi ini dapat dikatakan adanya kemungkinan fenomena kurangnya lapangan pekerjaan di Kota Bontang. Untuk itu diharapkan lapangan kerja yang baru dan lebih sustainable dapat dibentuk oleh Pemerintah.

Dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pun juga mengalami peningkatan. Tercatat TPAK Kota Bontang 65,16 persen sedangkan di tahun sebelumnya sebesar 64,52 persen. Berbicara TPAK erat kaitannya dengan lapangan kerja, hal ini dapat diturunkan dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK memberikan gambaran mengenai kesempatan seseorang untuk dapat terserap pada pasar kerja. Antara TKK dan TPT akan selalu berkaitan, seperti yang telah disebutkan bahwa semakin besar TKK maka TPT akan semakin kecil dan sebaliknya. Dengan semakin besarnya TKK,

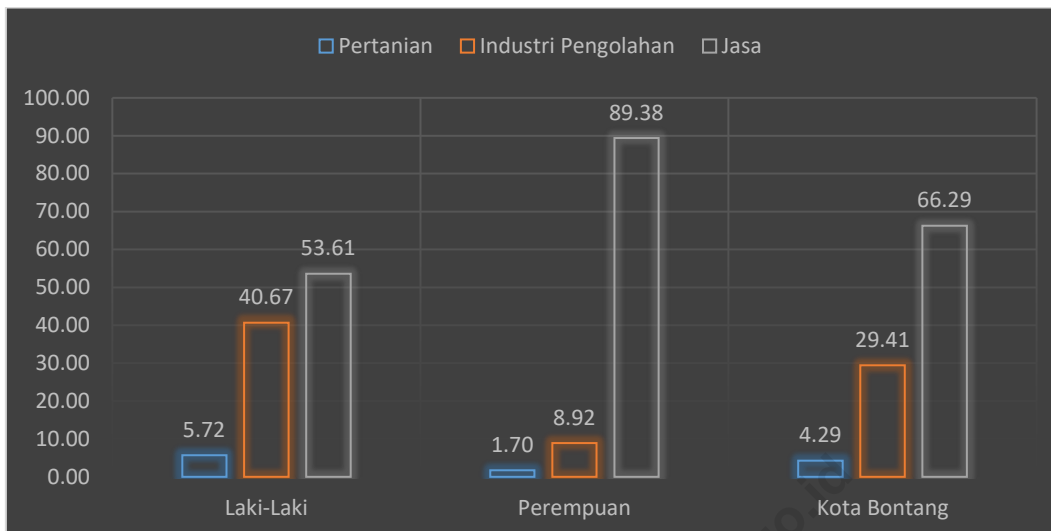
menggambarkan bahwa semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

Pada tahun 2018 TKK Kota Bontang sebesar 90,39 persen, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 87,56 persen. Angka TKK penduduk perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 94,41 dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 88,32. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja di Bontang lebih besar menyerap tenaga kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap fenomena ini, apakah lapangan kerja di Bontang yang terbesar adalah lapangan kerja informal, ataukah ada fenomena lain seperti PHK maupun lapangan kerja yang tutup/rugi.

6.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Kota Bontang merupakan kota industri yang sekarang akan berubah haluan menjadi Kota Pariwisata dan Maritim. Dalam publikasi ini Lapangan Usaha dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa. Penduduk Kota Bontang sebesar 66,29 persennya bekerja pada sektor Jasa, sedangkan sebesar 29,41 persen pada sektor Industri dan 4,29 persen pada sektor pertanian. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk Laki-laki dan perempuan Kota Bontang sebagian besar bekerja pada sektor Jasa. Hanya saja persentase sektor jasa penduduk perempuan lebih besar (89,39 persen) dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 53,61 persen. Pada Penduduk Laki-laki, nampaknya lebih terserap pada lapangan pekerjaan sektor Industri dimana persentasenya lebih besar (40,67 persen) dibandingkan penduduk perempuan yang hanya sebesar 8,92 persen.

Gambar 6.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Adapun status pekerjaan penduduk Kota Bontang paling besar adalah sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai baik penduduk Laki-laki maupun Perempuan. Hal ini tergambar dengan jelas di lapangan bahwa banyak perusahaan Industri dan juga perkantoran yang ada di Kota Bontang. Sehingga sebagian besar penduduknya adalah berstatus sebagai karyawan. Status pekerjaan paling banyak kedua adalah berusaha sendiri.

Gambar 6.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

6.3. Jam Kerja

Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir. Jumlah jam kerja 35 jam seminggu dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengelompokkan seorang pekerja apakah dia termasuk pekerja penuh atau pekerja tidak penuh. Penduduk yang jam kerjanya nol jam adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Batasan jam kerja 35 jam/minggu digunakan sebagai batas jam kerja normal. Semakin banyak jam kerja dari seorang pekerja selama seminggu, dapat mencerminkan tingginya produktivitas. Namun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan jam kerja juga dapat diartikan bahwa terdapat kemungkinan seorang pekerja menjadi kurang efisien dalam bekerja. Oleh karena itu, selain penggunaan jam kerja sebagai ukuran produktivitas, perlu juga diperhatikan aspek/variable lainnya, seperti jumlah/nilai output yang di hasilkan oleh seorang pekerja menggunakan jam kerjanya.

Tabel 6.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu di Kota Bontang, 2018

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (jam)	Persentase
(1)	(2)
0 ¹	2,58
1-14	6,95
15-24	4,42
25-34	7,65
35-40	30,20
41+	48,20
Jumlah	100,00

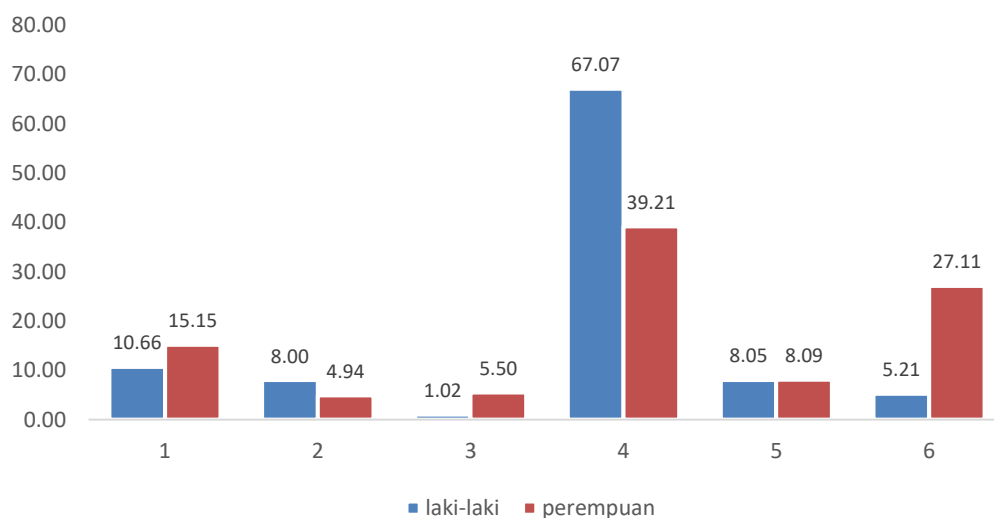
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Meskipun didominasi oleh tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, namun minat berwirausaha di Kota Bontang masih cukup tinggi. Hal ini terlihat pada jumlah tenaga kerja yang memilih untuk berusaha sendiri yang sebesar 12,12 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada. Apabila

dilihat menurut jenis kelaminnya, terlihat kondisi dimana kerja perempuan lebih mendominasi dari tenaga kerja laki-laki, yaitu sekitar 15,15 persen tenaga kerja perempuan dan 10,66 persen merupakan tenaga kerja laki-laki. Pada grafik 6.1. memperlihatkan perbandingan persentase jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing status kedudukan tenaga kerja di dalam pekerjaannya pada tahun 2017.

Seseorang yang berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, hal ini sejalan dengan kondisi cukup tingginya jumlah pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar di Kota Bontang, yaitu sekitar 12,33 persen. Sebagai bagian dari bangsa Timur, sebagian besar penduduk Indonesia menganut budaya bahwa bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki. Sedangkan perempuan mempunyai keleluasaan untuk memilih ikut bekerja di luar rumah atau tidak. Sehingga sebagian tenaga kerja perempuan di samping mengurus rumah tangga, juga bekerja membantu suami atau anggota rumah tangga lainnya sebagai pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Hal itu terlihat dari lebih tingginya persentase tenaga kerja perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga apabila dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Struktur tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya ditampilkan dengan lebih jelas oleh Grafik 6.1 berikut ini.

Gambar 6.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

BAB VII. PERUMAHAN

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain pangan dan sandang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas perumahan akan dipengaruhi oleh kualitas rumah penduduk beserta kawasan permukiman.

Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan kondisi perumahan yang sehat. Kondisi perumahan yang dimiliki secara tidak langsung dapat mencerminkan kualitas orang yang tinggal didalamnya, salah satunya adalah kualitas kesehatan. Terdapat beberapa indikator untuk penilaian rumah sehat, antara lain luas lantai yang ditempati, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, air minum, dan tempat pembuangan air besar.

7.1. Kondisi Perumahan

Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator awal yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki rumah sendiri relatif lebih mapan dibandingkan dengan rumah tangga yang menguasai rumah kontrakan. Berdasarkan status penguasaannya maka rumah dibedakan menjadi rumah milik sendiri, rumah sewa/kontrak, dan rumah lainnya, misal rumah bebas sewa atau rumah dinas. Tabel 7.1. di bawah ini menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah di Kota Bontang.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, 2016-2018

Status Kepemilikan Rumah	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	57,65	58,20	58,15
Kontrak/sewa	26,68	26,45	27,45
Lainnya	15,68	15,44	14,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Penduduk di Kota Bontang yang menguasai rumah dengan status kepemilikan milik sendiri adalah sebesar 58,15 persen pada tahun 2018. Penduduk dengan status penguasaan rumah milik sendiri memiliki persentase yang paling besar dibandingkan dengan status penguasaan kontrak/sewa dan lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2017, status kepemilikan rumah penduduk Kota Bontang mengalami penurunan sebesar 0,05 persen. Hal ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status menyewa atau mengontrak. Pada tahun 2018 adalah sekitar 27,45 persen. Jumlah rumah tangga yang mengontrak atau menyewa dapat dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut sebagai dampak dari tingginya migrasi masuk ke Kota Bontang, sehingga memicu berkembangnya usaha persewaan rumah. Jika dibandingkan tahun 2017, penduduk dengan status kepemilikan rumah sewa/kontrak adalah meningkat. Hal ini juga sangat terkait dengan tingkat mobilisasi penduduk Kota Bontang yang cukup tinggi. Sehingga bisa saja status penyewa atau pengontrak bertambah karena adanya penduduk yang berpindah masuk dari daerah luar. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan status lainnya (bebas sewa atau rumah dinas) adalah Sekitar 14,40 persen.

Indikator-indikator selanjutnya yang dapat digunakan dalam menilai kelayakan rumah yang ditempati oleh rumah tangga adalah luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan. Jenis atap, dinding, dan lantai sebuah rumah mempengaruhi kenyamanan penghuninya, bahkan lebih jauh dapat mempengaruhi

tingkat kesehatan. Tabel 7.2. berikut ini menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi rumah yang ditempati oleh rumah tangga Kota Bontang secara rata-rata.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bontang termasuk didalam tingkat kepadatan penduduk yang masih relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Kalimantan Timur. Sehingga ketersediaan lahan untuk pemukiman masih cukup tinggi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh angka rata-rata luas lantai tempat tinggal yang mencapai 92 m² pada tahun 2018. Apabila secara rata-rata dianggap setiap rumah tangga terdiri atas empat orang, maka rata-rata setiap anggota keluarga menempati luas lantai sekitar 23 m² atau dapat dikatakan layak.

Tabel 7.2. Kondisi Perumahan di Kota Bontang, 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata luas lantai yang dikuasai rumah tangga (m ²)	90,14	95,00	92,00
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, dan genteng	96,86	98,44	98,49
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding tembok	74,85	76,50	78,86
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding kayu	23,72	22,26	20,33
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai bukan tanah	99,91	99,91	99,52

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Selain ditinjau dari luas lantai, kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi rumah yaitu berupa atap. Berdasarkan jenisnya, terdapat beberapa macam bahan yang biasa digunakan sebagai atap yaitu genteng, sirap, seng, asbes, dan ijuk/rumbia. Sekitar 98,49 persen rumah tangga menggunakan atap berjenis seng, asbes, dan genteng pada tahun 2018. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis dinding terluas yang digunakan, Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018

sekitar 78,86 persen rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah berdinding tembok. Jumlah rumah tangga yang menempati rumah berdinding kayu berjumlah sekitar 20,33 persen di tahun 2018. Selain berkaitan dengan kenyamanan, jenis dinding terluas yang digunakan juga berkaitan dengan keamanan penghuninya, terutama terhadap kemungkinan terjadinya musibah kebakaran. Namun demikian, dinding kayu tidak selalu bisa diasosiasikan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, karena jenis kayu yang digunakan sangat beragam secara kualitas dan harga. Kelangkaan pasokan kayu mengakibatkan rumah berdinding jenis kayu tertentu justru mengindikasikan tingkat kesejahteraan pemiliknya yang tinggi.

Membicarakan tentang kelayakan hunian juga tidak terlepas dari kondisi lantai. Rumah dikatakan layak huni apabila berlantai selain tanah, baik berupa marmer, tegel, semen, atau kayu, Lantai tanah dapat mempengaruhi kualitas kesehatan penghuninya. Di Kota Bontang persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah sudah sangat tinggi, yaitu mencapai angka 99,52 persen pada tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tinggi, namun masih ada rumah tangga di Kota Bontang yang menghuni rumah berlantai tanah.

7.2. Fasilitas Rumah

Selain diindikasikan dengan bentuk dan kondisi bangunan fisik, rumah layak huni juga dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum, dan fasilitas MCK (mandi cuci kakus) yang memadai. Tabel di bawah ini memberikan gambaran rumah tangga Kota Bontang berdasarkan ketersediaan fasilitas rumah yang ditempati.

Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/ Bangunan di Kota Bontang, 2016-2018

Fasilitas Perumahan / Bangunan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga pengguna listrik	99,92	99,91	99,85
Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri	67,41	-	-
Rumah tangga yang menggunakan tangki septik	93,25	92,36	92,05

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Ketersediaan sumber penerangan yang memadai merupakan faktor pendukung kelancaran aktivitas penduduk. Pada Tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di Kota Bontang telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Sekitar 99,85 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Sedangkan sisanya menggunakan sumber lain seperti petromak atau pelita. Besarnya jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik tentu saja harus diikuti oleh pasokan listrik yang mencukupi. Listrik di Kota Bontang sebagian besar dipasok oleh PLN dan sebagian dibangkitkan oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang seperti PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak, dan sebagian kecil dibangkitkan sendiri oleh rumah tangga menggunakan genset. Listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan utamanya ditujukan untuk perumahan karyawannya. Pada tahun 2018, rumah tangga yang dialiri oleh listrik PLN adalah sekitar 94,93 persen. Sedangkan yang dialiri listrik non PLN adalah sekitar 4,92 persen. Persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama yang digunakan ditunjukkan oleh Tabel 7.4. berikut ini.

Tabel 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, 2016-2018

Sumber Penerangan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	91,07	94,85	94,93
Listrik Non PLN	8,86	5,05	4,92
Petromak/aladin/lainnya	0,08	0,09	0,15
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang cukup beragam, misalnya air minum dalam kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng, sumur, dan mata air baik yang terlindung maupun tidak terlindung. Tabel berikut ini menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum utama yang dikonsumsi.

Terdapat sekitar 3,0 persen rumah tangga yang menggunakan air dalam kemasan bermerk. Hal ini umumnya dilakukan oleh rumah tangga berpenghasilan di atas rata-rata mengingat harga air dalam kemasan bermerk yang jauh lebih tinggi dari pada air isi ulang. Apabila dilihat persentase rumah tangga pengguna air sumur, ternyata masih ada sekitar 0,61 persen rumah tangga yang menggunakan air sumur yang tidak terlindungi. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pengetahuan atau sebab lainnya seperti biaya dan lain-lain.

Tabel 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, 2018

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
Air Kemasan Bermerk	4,97
Air isi ulang	72,08
Air leding	18,83
Sumur bor/pompa	0,37
Sumur terlindung	1,09
Sumur tak terlindung	0,61
Mata air terlindung	2,05
Air hujan	-
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Apabila dilihat berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan tempat buang air besar sendiri yaitu sekitar 94,39 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara umum/bersama-sama dengan rumah tangga lain adalah sekitar 6,25 persen. Selain itu masih ada rumah tangga yang tidak/belum mempunyai fasilitas tempat buang air besar, yaitu sekitar 0,36 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Hal tersebut ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini.

Tabel 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2016-2018

Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	94,19	94,14	93,39
Bersama/umum	5,31	4,94	6,25
Tidak ada	0,50	0,93	0,36
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Jenis kloset yang digunakan pada fasilitas tempat buang air besar sangat berpengaruh pada kesehatan para pemakainya. Jenis kloset yang cenderung tertutup seperti leher angsa adalah sangat baik apabila dilihat dari segi kesehatan maupun segi estetika. Sedangkan jenis kloset seperti cemplung/cubluk maupun plengsengan dapat menimbulkan masalah seperti bau yang mengganggu. Tabel 7.8. berikut ini menunjukkan persentase rumah tangga di Kota Bontang berdasarkan jenis kloset yang digunakan.

Tabel 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, 2016-2018

Jenis Kloset	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher angsa	95,93	96,98	97,43
Plengsengan	1,30	0,20	-
Cemplung/cubluk	2,77	2,82	2,57
Tidak pakai	-	-	-
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Jenis kloset yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang adalah yang berbentuk leher angsa, yaitu kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Rumah tangga yang menggunakan kloset jenis ini adalah sekitar 97,43 persen. Sementara tidak ada rumah tangga yang menggunakan kloset berjenis plengsengan. Kloset plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan kloset berjenis cemplung/cubluk adalah sekitar 2,57 persen.

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB VIII. POLA KONSUMSI

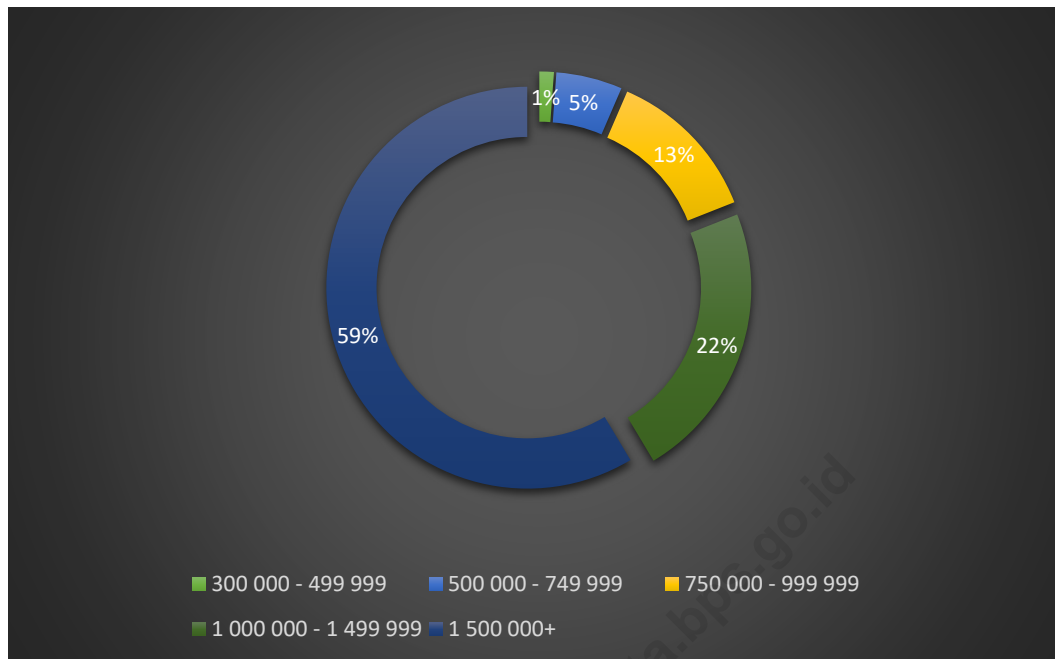
Berbicara tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata, dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan tingkat kesejahteraan dilakukan dengan melihat pola pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf kehidupan rumah tangga.

Melalui survei yang dilakukan oleh BPS Kota Bontang, diperoleh informasi mengenai keadaan sosial ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Berikut disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang pada tahun 2018.

8.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dibandingkan dengan pengeluaran yang dikerluarkan guna memenuhi kebutuhan hidup layak. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran maka dapat dikatakan semakin sejahtera suatu rumah tangga tersebut. Kota Bontang sendiri sebesar 59 persen penduduk memiliki pengeluaran per kapita sebulan di atas 1,5 juta. Sedangkan sebagian kecil masih ada penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan sebesar 300 ribu hingga 400 ribu rupiah.

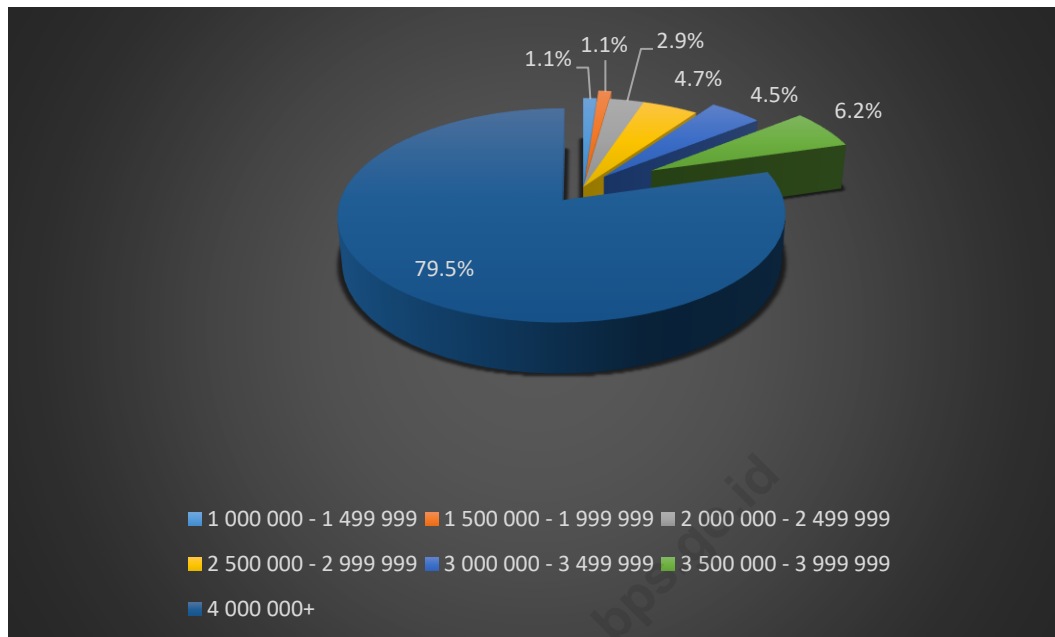
Gambar 8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bontang, 2018



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Jika dilihat dari rumah tangga, sebesar 79,5 persen rumah tangga di Kota Bontang memiliki pengeluaran di atas 4 juta rupiah per bulannya. Sedangkan sebagian kecil masih ada rumah tangga yang memiliki pengeluaran rumah tangga per bulannya berkisar 1 juta hingga 2 juta yaitu sebesar 2,2 persen. Dengan melihat dua grafik di atas dapat dikatakan penduduk Kota Bontang dalam taraf kehidupan menengah ke atas. Namun masih ada juga penduduk yang memiliki pengeluaran yang sedikit. Sedikitnya pengeluaran menunjukkan sedikitnya pendapatan. Untuk itu lebih di dalam lagi bagaimana kesenjangan antara rumah tangga di Kota Bontang.

Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Sebulan di Kota Bontang, 2018



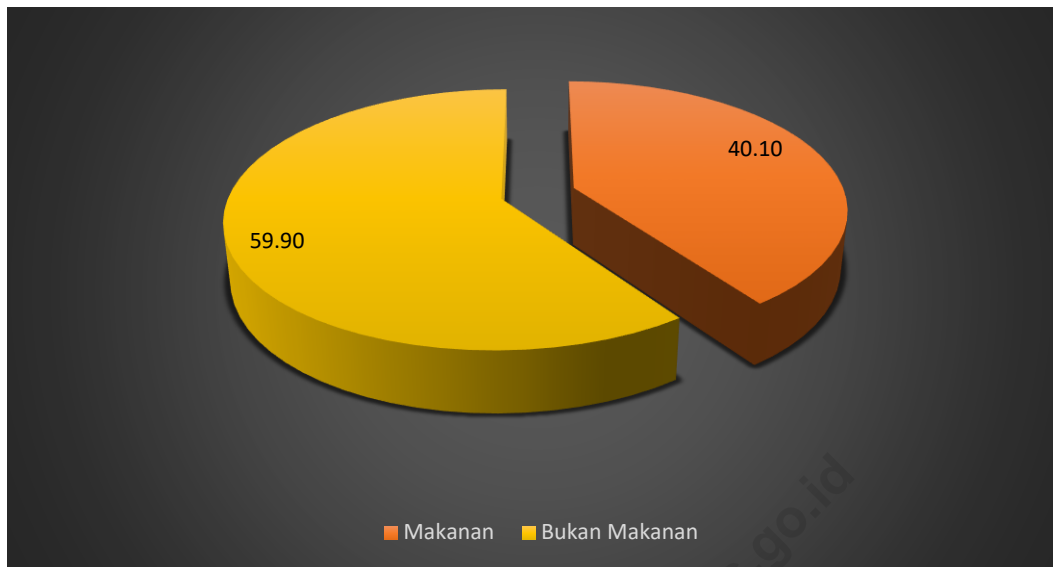
Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

8.2. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga

Pada daerah yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Sementara di daerah yang maju, pengeluaran bukan makanan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga karena pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan utama. Pengeluaran primer sudah bergeser pada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Bagi daerah yang sedang berkembang stabilitas harga kebutuhan pokok perlu diaga karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok baik untuk komoditas makanan maupun non makanan yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Penduduk Kota Bontang Tahun 2018 memiliki proporsi pengeluaran non makanan yang lebih besar dibandingkan dengan makanan yaitu sebesar 59,90 persen.

Gambar 8.3. Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Jenisnya Kota Bontang, 2018



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Adapun pengeluaran makanan yang sebesar 40,10 persen dari total pengeluaran, paling banyak dikeluarkan untuk makanan dan minuman jadi yang sebesar 39,91 persen. Pola konsumsi penduduk Kota Bontang cenderung konsumtif untuk makanan jadi, mengingat sekarang banyak bermunculan makanan kekinian dan café. Selain itu penduduk Kota Bontang masih menjadi penggemar ikan, dimana 11,04 persennya dibelanjakan untuk mengkonsumsi ikan. Pola konsumsi makanan penduduk Kota Bontang di tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dimana paling banyak dihabiskan untuk makanan jadi dan ikan.

Tabel 8.1. Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Makanan Rumah Tangga Kota Bontang, 2017-2018

Kelompok Makanan	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)		Persentase Rata-rata Pengeluaran (%)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	63 813	67 457	8,39	8,54
Umbi-umbian	5 262	4 730	0,69	0,60
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	82 285	87 182	10,81	11,04
Daging	41 909	39 565	5,51	5,01
Telur dan susu	53 006	53 467	6,96	6,77
Sayur-sayuran	55 340	49 170	7,27	6,23
Kacang-kacangan	12 464	12 706	1,64	1,61
Buah-buahan	40 089	48 769	5,27	6,17
Minyak dan Kelapa	15 462	14 414	2,03	1,82
Bahan minuman	20 409	18 700	2,68	2,37
Bumbu-bumbuan	15 021	15 044	1,97	1,90
Konsumsi lainnya	13 205	13 409	1,74	1,70
Makanan dan minuman jadi	288 406	315 260	37,90	39,91
Rokok	54 318	49 963	7,14	6,33
Jumlah	760 989	789 838	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Untuk pengeluaran non makanan di tahun 2018 penduduk Kota Bontang lebih memilih mengonsumsi barang dalam bentuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 46,53 persen. Selanjutnya sebesar 25,24 persen dihabiskan untuk aneka barang dan jasa. Untuk pembelian pakaian alas kaki dan tutup kepala masih berada dibawah barang tahan lama yang berturut-turut sebesar 5,29 persen

dan 10,38 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 pengeluaran terhadap perumahan dan fasilitas rumah tangga serta aneka barang dan jasa mengalami penurunan. Sedangkan pengeluaran untuk pakaian dan barang tahan lama meningkat hamper dua kalinya.

Tabel 8.2. Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Non Makanan Rumah Tangga Kota Bontang, 2017-2018

Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)		Persentase Rata-rata Pengeluaran (%)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	498 383	548 912	56,81	46,53
Aneka barang dan jasa	233 991	297 788	26,67	25,24
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	22 679	62 423	2,59	5,29
Barang yang tahan lama	45 193	122 410	5,15	10,38
Pajak, pungutan, dan asuransi	73 373	74 964	8,36	6,35
Keperluan pesta dan upacara	3 694	73 185	0,42	6,20
Jumlah	877 313	1 179 683	100,00	100,00



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

Jl. Awang Long No. 02 RT 08 Kota Bontang
Telp. (0548)26066 fax. (0548)27706

Email: bps6474@bps.go.id Homepage: <http://bontangkota.bps.go.id>

ISSN 2656-9272



9 772656 927000